



MEMBANGUN DAYA SAING BANGSA BERBASIS SEKTORAL TANPA KORUPSI



**Agus Eko Sujianto
Mashudi**

MEMBANGUN DAYA SAING BANGSA BERBASIS SEKTORAL TANPA KORUPSI

Agus Eko Sujianto
Mashudi



JUDUL:
MEMBANGUN DAYA SAING BANGSA BERBASIS
SEKTORAL TANPA KORUPSI

Penulis:
Agus Eko Sujianto
Mashudi

ISBN : 978-623-88483-5-5 (PDF)

Editor :
Honorata Ratnawati Dwi Putranti.

Penerbit :
Badan Penerbit STIEPARI Press
Redaksi:
Jl Lamongan Tengah no. 2
Bendan Ngisor, Gajahmungkur
Semarang
Tlpn. (024) 8317391
Fax . (024) 8317391
Email: steparipress@badanpenerbit.org

Hak Cipta dilindungi Undang undang
Dilarang memperbanyak karya Tulis ini dalam bentuk
apapun.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,

Pembahasan tentang indeks daya saing ini menjadi menarik ketika di integrasikan dengan variabel makro ekonomi yang lainnya seperti indeks pendidikan, indeks kewirausahaan dan indeks korupsi. Menurut Tomáš daya saing negara di tingkat global baik negara maju maupun berkembang ditentukan oleh 3 aspek yaitu: aspek faktor-faktor ekonomi, efisiensi dan inovasi. Yang dimaksud dengan faktor-faktor ekonomi yaitu sumber daya manusia (Tomáš, 2011). Menurut Kementerian Keuangan, daya saing suatu bangsa dapat terwujud ketika didorong oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak terlepas dari pembangunan di bidang pendidikan (Kemenkeu, 2020).

Wassalam,

Semarang, 23 Mei 2023
Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I. DAYA SAING INDUSTRI	1
BAB II. ANGKA INDEKS	8
A. Pengertian Angka Indeks	8
B. Indeks Daya Saing	11
C. Faktor – Faktor Indeks Daya Saing	25
D. Indeks Pendidikan	28
E. Indeks Kewirausahaan.....	35
F. Indeks Korupsi	44
BAB III. DAYA SAING BERBASIS SEKTORAL	51
BAB IV. STUDI KASUS PADA 14 NEGARA TERPILIH	61
A. Implikasi Indeks Pendidikan Terhadap Indeks Daya Saing	73
B. Implikasi Indeks Kewirausahaan Terhadap Indeks Daya Saing	76
C. Implikasi Indeks Korupsi Terhadap Indeks Daya Saing	78
DAFTAR PUSTAKA	83
Biografi Penulis	99



DAYA SAING INDUSTRI

Daya saing dalam arti yang luas dapat dikaitkan dengan suatu industri, wilayah bahkan daya saing suatu negara. Daya saing pada masa awal pengkajian hanya terkait dengan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumennya. Layanan terbaik inilah yang kemudian dapat menghasilkan keuntungan, dan keuntungan ini digunakan untuk menjalankan perusahaan, memberikan upah kepada karyawan, memberikan balas jasa kepada pemegang saham dan untuk berkembang memperluas usaha dan cakupan pemasarannya. Namun sekarang daya saing berkembang dan dapat diperluas cakupannya mulai dari suatu industry bahkan negara yang dikaji dalam penelitian ini sekalipun.

Dalam kaitannya dengan daya saing industri, Kuncoro menjelaskan bahwa daya saing menunjukkan perbandingan antara pangsa ekspor komoditas atau sekelompok komoditas suatu negara terhadap pangsa ekspor komoditas tersebut di dunia (Kuncoro,

2015b). Dalam *scope* internasional, daya saing ini terkait dengan produktivitas (Schwab, 2019a) dan sangat bergantung pada kualitas faktor produksi khususnya sumber daya manusia (*Penyusunan Indeks Kesetaraan Dan Pemberdayaan Gender. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017*). Oleh karenanya tingkat daya saing yang dalam studi ini diukur oleh indeks daya saing antar negara berbeda-beda, dan kualitas sumber daya manusia berkontribusi dalam meningkatkan angka indeks ini.

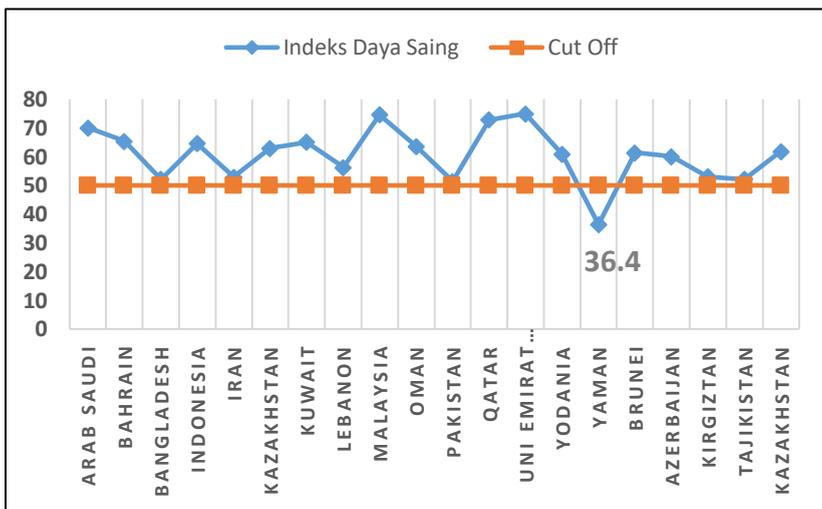
Berdasar pengamatan terhadap indeks kualitas sumber daya manusia yang diukur oleh *Human Capital Index* (HCI) dapat dijelaskan bahwa menurut Bank Dunia, nilai HCI negara-negara di benua Afrika yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) lebih rendah dibanding negara-negara di benua Asia yang sama-sama tergabung dalam OKI. Dan nilai ini selanjutnya berimplikasi terhadap nilai indeks daya saing negara-negara tersebut, yaitu indeks daya saing di Asia lebih tinggi dibanding negara-negara di Afrika.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak kelahirannya pada tahun 1969 silam, dan sampai dengan tahun 2020 ini tercatat bahwa jumlah anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebanyak 57 negara yang tersebar di 4 benua yaitu: Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Di Asia terdapat 27 negara, Afrika sebanyak 27 negara, Eropa ada 1 negara dan Amerika 2 negara. Selanjutnya penelitian ini hanya meneliti pada negara-negara anggota OKI di Asia dengan pertimbangan, bahwa secara global indeks daya saing negara-

negara di ASIA lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks daya saing negara-negara di Afrika.

Berdasar pengamatan dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota OKI di ASIA yang memiliki ketersediaan data pada tahun 2019 sebanyak 20 negara. Hanya sebesar 5% atau 1 negara saja yang masuk dalam kategori rendah indeks daya saingnya yaitu Yaman. Rendahnya indeks data saing Yaman lebih disebabkan oleh kondisi ekonomi dan politik, yaitu perang saudara. Sekitar 95% negara anggota di ASIA masuk dalam kategori sedang karena nilainya > 50 (di atas garis *cut off* sebagaimana Gambar 1.1).

Gambar 1.1. Indeks Daya Saing Negara-negara di Asia

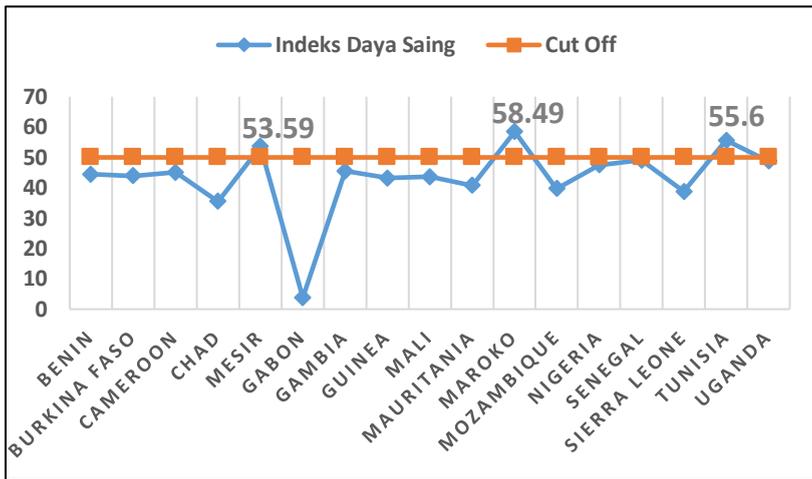


Sumber: Data Sekunder, Diolah (2021)

Sebagai perbandingan, di Afrika sebesar 82% atau sebanyak 17 negara yang termasuk dalam kategori rendah indeks daya saingnya, dan hanya 3 negara yang masuk dalam kategori sedang

yaitu Mesir, Maroko dan Tunisia (berada di atas garis *cut off* sebagaimana pada Gambar 1.2). Berdasar angka indeks daya saing inilah, negara-negara anggota OKI di ASIA dipilih untuk diamati dan diteliti karena perekonomiannya di kawasan ini sangat dinamis dan efisien sehingga layak untuk diteliti.

Gambar 1.2. Indeks Daya Saing Negara-negara di Afrika



Sumber: Data Sekunder, Diolah (2021)

Indeks daya saing dipilih dengan pertimbangan bahwa angka ini mengukur tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya atau input produksi yaitu tenaga kerja, sumber daya insani, sumber daya alam serta modal dalam bentuk uang sehingga akan terwujud produktivitas yang optimal di suatu negara pada tahun tertentu (Nadya et al., 2015). Sedangkan untuk mengukur indeks daya saing didasarkan pada beberapa aspek yaitu: institusi, sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, makroekonomi yang stabil, kesehatan, keterampilan, pasar barang dan jasa, pasar

tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran ekonomi, dinamika bisnis serta kemampuan inovasi menjadi aspek penting dalam pengukuran daya saing suatu negara. Aspek-aspek tersebut dikenal dengan istilah 12 pilar indeks daya saing global (Costea et al., 2016).

Pembahasan tentang indeks daya saing ini menjadi menarik ketika diintegrasikan dengan variabel makro ekonomi yang lainnya seperti indeks pendidikan, indeks kewirausahaan dan indeks korupsi. Menurut Tomáš daya saing negara di tingkat global baik negara maju maupun berkembang ditentukan oleh 3 aspek yaitu: aspek faktor-faktor ekonomi, efisiensi dan inovasi. Yang dimaksud dengan faktor-faktor ekonomi yaitu sumber daya manusia (Tomáš, 2011). Menurut Kementerian Keuangan, daya saing suatu bangsa dapat terwujud ketika didorong oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak terlepas dari pembangunan di bidang pendidikan (Kemenkeu, 2020).

Efisiensi terkait dengan korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Hariyani et al. bahwa korupsi menjadikan sektor publik tidak efisien karena dana yang sedianya digunakan untuk mendukung pembangunan diselewengkan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadinya. Akibat dari tindak pidana korupsi ini investor merasa kurang nyaman dalam berinvestasi dan berisiko pada pengalihan investasi ke luar negeri. Jadi jelas korupsi dapat merugikan bangsa dan negara (Hariyani et al., 2018). Sedangkan inovasi merupakan nafas dari kewirausahaan, dan dengan

kewirausahaan maka dapat mendorong inovasi, serta kewirausahaan dan inovasi berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Acs et al., 2019).

Pemikiran singkat yang didasarkan pada pengamatan terhadap literatur dan pengamatan di lapangan di atas sangatlah jelas, bahwa daya saing suatu negara tidak datang begitu saja serta tidak terlepas dari aspek-aspek yang mempengaruhinya. Implikasi dari aspek-aspek yang berkontribusi terhadap daya saing inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan mengambil lokus penelitian pada negara-negara anggota OKI di ASIA sebanyak 14 negara yaitu: Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab dan Yordania. Aspek-aspek yang di dalam dalam studi ini yaitu indeks pendidikan, indeks kewirausahaan dan indeks korupsi, menggunakan data series tahun 2015-2019.

Pertanyaannya, Bagaimana implikasi indeks pendidikan terhadap indeks daya saing?; Bagaimana implikasi indeks kewirausahaan terhadap indeks daya saing?; Bagaimana implikasi indeks korupsi terhadap indeks daya saing?.

Buku ini secara mendalam mengkaji tentang indeks pendidikan, indeks kewirausahaan dan indeks korupsi dalam sumbangannya dalam meningkatkan indeks daya saing negara-negara anggota OKI di ASIA. Negara-negara yang dikaji dalam penelitian ini sebanyak 14 negara anggota OKI di ASIA sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk

menggeneralisasi lokus penelitian. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemilihan lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa yaitu negara-negara di kawasan ini memiliki kondisi ekonomi yang dinamis tentunya jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Afrika dan lain sebagainya.



BAB II
ANGKA INDEKS

A. Pengertian Angka Indeks

Menurut O'Neill (2015), bahwa angka indeks digunakan untuk mengumpulkan informasi yang detail tentang harga dan kuantitas dalam ukuran skala tingkat harga dan tingkat kuantitas. Angka indeks disebut juga dengan nilai statistik yang mengukur perubahan variabel tertentu dan terkait dengan unsur waktu. Hjertstrand et al. (2021) menjelaskan bahwa angka indeks merupakan ukuran statistik yang dirancang untuk mengukur perubahan terhadap variabel, atau sekelompok variabel tertentu. Bisa juga dinyatakan bahwa angka indeks merupakan rasio tunggal (atau persentase) yang mengukur perubahan gabungan beberapa variabel yang berbeda.

Pendapat di atas relevan dengan Sukirno (2014) bahwa angka indeks merupakan angka yang dapat digunakan untuk menterjemahkan perubahan rata-rata dari himpunan data pada situasi dan kondisi waktu tertentu. Ulfa (2020) mengemukakan bahwa angka indeks ini memberikan arah terhadap perubahan relatif mengenai nilai, kuantitas dan harga tentunya yang dibandingkan dengan tahun dasarnya. Yang dimaksud dengan

tahun dasar disini yaitu: (1) tahun yang menjadi dasar perbandingan; (2) tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil; (3) tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya masih bermakna.

Sementara itu Eliezar (2020) menjelaskan bahwa angka indeks merupakan suatu bilangan angka tanpa memiliki satuan, yang dapat menunjukkan perbandingan dan atau perbedaan suatu produksi, nilai atau harga dengan terbatas pada unsur jenis, tempat dan waktu yang berbeda. Selanjutnya berdasar jenisnya angka indeks dibedakan menjadi 3 yaitu: (1) Angka Indeks Harga, yaitu yang menjadi objek penelitian adalah harga; (2) Angka Indeks Produksi, yaitu yang menjadi objek penelitian adalah produksi dan (3) Angka Indeks Nilai, yaitu yang menjadi objek penelitian adalah nilai. Sedangkan menurut cara penghitungannya dibedakan menjadi 2 yaitu: (1) Angka Indeks Tidak Tertimbang (Angka indeks relative, Angka indeks agregatif sederhana, Angka indeks rata-rata hitung relatif) dan (2) Angka Indeks Tertimbang (Angka indeks agregatif misalnya angka indeks Laspeyres, Paasche, Fisher, Marshall-Edgeworth, Walsh) dan Angka indeks rata-rata hitung relatif).

Indeks dengan metode Laspeyres, dikembangkan pada akhir abad 18 untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar. Indeks dengan metode Paasche, menggunakan bobot tahun berjalan

dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Indeks dengan metode metode Fisher menggunakan pedoman bahwa: (1) Fisher mencoba memperbaiki formula Laspeyres dan Paasche; (2) Indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks serta (3) Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain baik Laspeyres maupun Paasche. Indeks dengan metode Drobisch, digunakan apabila nilai Indeks Laspeyres dan Indeks Paasche berbeda terlalu jauh. Indeks Drobisch juga merupakan jalan tengah selain Indeks Fisher serta Indeks Drobisch ini merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Indeks dengan metode Marshal-Edgeworth memberikan catatan bahwa Formula Marshal-Edgeworth relatif berbeda dengan konsep Laspeyres dan Paasche. Metode ini menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun dengankuantitas pada tahun dasar. Sedangkan pembobotannya diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Terakhir indeks dengan metode Wals, ketentuan yang digunakan untuk pembobot berupa akar dari perkaliankuantitastahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar (Ulfa, 2020).

Dalam kaitannya dengan manfaat dan tujuan, Rosyidi (2020) mengemukakan bahwa manfaat dari mempelajari angka indeks yaitu: (1) untuk menunjukkan perbandingan tingkat harga antara tingkat harga sesuatu tahun tertentu dengan tingkat harga yang terjadi di tahun lainnya; (2) untuk menyatakan perubahan tingkat harga, tidak saja dari tahun ke tahun, tetapi untuk menyatakan

perbandingan harga dari bulan ke bulan, minggu ke minggu dan bahkan dari hari ke hari.

Sedangkan tujuannya menurut Ulfa (2020) untuk mengetahui progres suatu usaha atau kegiatan serta untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Contoh angka indeks ini yaitu: indeks harga untuk mengukur perubahan harga (berapa kenaikannya/penurunannya); indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi; indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi dan lain sebagainya.

Jadi yang menjadi perhatian dalam membahas angka indeks ini yaitu untuk memberikan pemahaman bahwa angka indeks terjadi ketika terdapat perubahan dalam variabel ekonomi. Pada awalnya angka indeks hanya membahas tentang indeks harga dan indeks produksi yang menjelaskan tentang perubahan aktivitas ekonomi, namun dalam perkembangannya mengalami perluasan sampai dengan pembahasan tentang indeks daya saing, indeks pendidikan, indeks kewirausahaan dan indeks korupsi seperti yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

B. Indeks Daya Saing

Tingkat daya saing atau *competitiveness* menjadi indikator ekonomi yang menunjukkan mengenai konsep pembangunan yang terus menerus (berkelanjutan). Semakin tinggi *competitiveness* suatu wilayah maka dapat menunjukkan peningkatan kesejahteraan

masyarakatnya dibandingkan dengan wilayah lainnya bisa dalam konteks negara maupun konteks daerah (Kemenristek-BRIN, 2020). Menurut Kuncoro (2015), untuk mewujudkan daya saing diperlukan keseimbangan sekaligus kesiapan secara kelembagaan baik dalam hal infrastruktur maupun suprastruktur sehingga komoditas ekspor dapat diterima di pasar internasional.

Pentingnya aspek suprastruktur untuk mewujudkan daya saing produk suatu negara dikarenakan bahwa untuk menciptakan daya saing bukan saja menjadi tanggungjawab perusahaan dan atau pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat tidak terkecuali lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan politik contohnya lembaga negara legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagaimana termaktub dalam Kemendikbud RI (2017). Lembaga-lembaga ini sangat penting keberadaannya untuk membangun daya saing bangsa dan negara Indonesia.

Daya saing dalam konteks internasional atau global dikenal dengan istilah *Global Competitiveness Index* atau disingkat dengan GCI, dimana GCI merupakan gabungan faktor-faktor yang penting dalam suatu perekonomian sehingga dapat mendorong produktivitas suatu negara. Menurut *The Global Competitiveness Report* (2018), daya saing merupakan faktor yang menentukan capaian tingkat produktivitas suatu negara pada periode waktu tertentu. Tingkat produktivitas, pada gilirannya, menentukan tingkat kemakmuran yang dapat

dicapai oleh suatu perekonomian. Tingkat produktivitas juga menentukan tingkat pengembalian yang diperoleh dari investasi dalam suatu perekonomian, yang pada gilirannya merupakan pendorong mendasar dari tingkat pertumbuhannya. Dengan kata lain, ekonomi yang lebih kompetitif adalah ekonomi yang cenderung tumbuh lebih cepat dari waktu ke waktu.

Faktor-faktor yang penting dalam suatu perekonomian untuk membangun tingkat daya saing suatu negara yaitu: inovasi, ukuran ekonomi, dinamika bisnis, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, pasar barang dan jasa, keterampilan, kesehatan, stabilitas makroekonomi, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan institusi (Costea et al., 2016; Schwab, 2019b). Sedangkan Nadya et al. (2020); Schwab (2019) daya saing global dikelompokkan menjadi 4 indikator utama yaitu: ekosistem inovasi, pasar, modal manusia dan lingkungan yang mendukung. Yang menjadi kekuatan Nadya et al. (2020); Schwab (2019) yaitu dengan memasukkan indikator modal manusia sebagai indikator penting untuk mengukur daya saing.

Sebagaimana dikemukakan oleh Costea et al. (2016); Nadya et al. (2020); Schwab (2019) di atas, kemudian *The Global Competitiveness Report* (2018) melakukan penjabaran bahwa untuk menghitung indeks daya saing global yaitu dengan memasukkan rata-rata tertimbang dari banyak komponen yang berbeda, masing-masing mengukur aspek daya saing yang berbeda. Komponen tersebut dikelompokkan ke dalam 12 kategori

atau pilar daya saing. Kategori pertama yaitu Institusi. Lingkungan kelembagaan suatu negara tergantung pada efisiensi dan perilaku pemangku kepentingan publik dan swasta. Kerangka hukum dan administrasi di mana individu, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi menentukan kualitas lembaga publik suatu negara dan memiliki pengaruh yang kuat pada daya saing dan pertumbuhan. Ini mempengaruhi keputusan investasi dan organisasi produksi dan memainkan peran kunci dalam cara masyarakat mendistribusikan manfaat dan menanggung biaya strategi dan kebijakan pembangunan. Lembaga swasta yang baik juga penting untuk pembangunan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Krisis keuangan global 2007/2008, bersama dengan berbagai skandal perusahaan, telah menyoroti relevansi standar akuntansi dan pelaporan dan transparansi untuk mencegah penipuan dan salah urus.

Pilar kedua, yaitu infrastruktur. Menurut *The_Global_Competitiveness_Report* (2018) Infrastruktur yang luas dan efisien sangat penting untuk memastikan berfungsinya perekonomian secara efektif. Sarana transportasi yang efektif yaitu: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan transportasi udara yang berkualitas tinggi memungkinkan pengusaha untuk memasarkan barang dan jasa mereka ke pasar dengan cara yang aman dan tepat waktu serta memfasilitasi perpindahan pekerja ke pekerjaan yang paling sesuai. Perekonomian juga bergantung pada pasokan listrik yang bebas dari gangguan dan kekurangan sehingga bisnis dan

pabrik dapat bekerja tanpa hambatan. Akhirnya, jaringan telekomunikasi yang solid dan luas memungkinkan arus informasi yang cepat dan bebas, yang meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan dengan membantu memastikan bahwa bisnis dapat berkomunikasi dan keputusan dibuat oleh pelaku ekonomi dengan mempertimbangkan semua informasi relevan yang tersedia.

Masih menurut *The_Global_Competitiveness_Report* (2018), bahwa kategori ketiga yaitu Lingkungan ekonomi makro. Dijelaskan bahwa stabilitas lingkungan ekonomi makro penting bagi bisnis dan, oleh karena itu, penting bagi daya saing keseluruhan suatu negara. Meskipun memang benar bahwa stabilitas makroekonomi saja tidak dapat meningkatkan produktivitas suatu bangsa, tetapi juga diakui bahwa kekacauan makroekonomi merugikan perekonomian, seperti yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, secara mencolok dalam konteks Eropa. Pemerintah tidak dapat memberikan layanan secara efisien jika harus melakukan pembayaran bunga tinggi atas utang masa lalunya. Menjalankan defisit fiskal membatasi kemampuan masa depan pemerintah untuk bereaksi terhadap siklus bisnis. Perusahaan tidak dapat beroperasi secara efisien ketika tingkat inflasi tidak terkendali. Singkatnya, ekonomi tidak dapat tumbuh secara berkelanjutan kecuali lingkungan makro stabil.

Selanjutnya pilar keempat yaitu Kesehatan dan pendidikan dasar. Tenaga kerja yang sehat sangat penting bagi daya saing dan produktivitas suatu negara. Pekerja yang sakit tidak dapat berfungsi

secara maksimal dan akan kurang produktif. Kesehatan yang buruk menyebabkan biaya bisnis yang signifikan, karena pekerja yang sakit sering tidak hadir atau beroperasi pada tingkat efisiensi yang lebih rendah. Oleh karena itu, investasi dalam penyediaan layanan kesehatan sangat penting untuk pertimbangan ekonomi dan moral yang jelas. Selain kesehatan, pilar ini mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar yang diterima penduduk, yang merupakan fundamental dalam perekonomian saat ini. Pendidikan dasar meningkatkan efisiensi setiap individu pekerja (The_Global_Competitiveness_Report, 2018).

Selanjutnya masih menurut The_Global_Competitiveness_Report (2018) yang mengurai bahwa pilar kelima yaitu Pendidikan tinggi dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tinggi yang berkualitas sangat penting bagi perekonomian yang ingin meningkatkan rantai nilai di luar proses produksi dan produk sederhana. Secara khusus, ekonomi global saat ini mengharuskan negara-negara untuk memelihara kumpulan pekerja terdidik yang mampu melakukan tugas-tugas kompleks dan beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan mereka yang berubah dan kebutuhan sistem produksi yang berkembang. Pilar ini mengukur tingkat pendaftaran sekolah menengah dan tinggi serta kualitas pendidikan yang dievaluasi oleh para pemimpin bisnis. Tingkat pelatihan staf juga dipertimbangkan karena pentingnya kejuruan dan pelatihan di tempat kerja yang berkelanjutan, yang

diabaikan di banyak negara, untuk memastikan peningkatan keterampilan pekerja secara konstan.

Terkait pilar keenam, *The_Global_Competitiveness_Report* (2018) menjelaskan bahwa pilar Efisiensi pasar barang merupakan aspek penting untuk meningkatkan daya saing. Negara-negara dengan pasar barang yang efisien memiliki posisi yang baik untuk menghasilkan bauran produk dan jasa yang tepat mengingat kondisi penawaran dan permintaan khusus mereka, serta untuk memastikan bahwa barang-barang ini dapat paling efektif diperdagangkan dalam perekonomian. Persaingan pasar yang sehat, baik domestik maupun asing, penting dalam mendorong efisiensi pasar, dan dengan demikian produktivitas bisnis, dengan memastikan bahwa perusahaan yang paling efisien, yang memproduksi barang yang diminta pasar, adalah perusahaan yang berkembang. Efisiensi pasar juga tergantung pada kondisi permintaan seperti orientasi pelanggan dan kecanggihan pembeli. Untuk alasan budaya atau sejarah, pelanggan mungkin lebih menuntut di beberapa negara daripada di negara lain. Hal ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang penting, karena memaksa perusahaan untuk lebih inovatif dan berorientasi pada pelanggan dan dengan demikian memaksakan disiplin yang diperlukan untuk efisiensi yang akan dicapai di pasar.

Kategori ketujuh yaitu Efisiensi pasar tenaga kerja. Efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja dialokasikan untuk penggunaan mereka

yang paling efektif dalam perekonomian dan diberikan insentif untuk memberikan upaya terbaik mereka dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pasar tenaga kerja harus memiliki fleksibilitas untuk memindahkan pekerja dari satu kegiatan ekonomi ke kegiatan ekonomi lainnya dengan cepat dan dengan biaya rendah, dan memungkinkan fluktuasi upah tanpa banyak gangguan sosial. Pasar tenaga kerja yang efisien juga harus memastikan insentif kuat yang jelas bagi karyawan dan mempromosikan meritokrasi di tempat kerja, dan mereka harus memberikan kesetaraan dalam lingkungan bisnis antara perempuan dan laki-laki. Secara bersama-sama, faktor-faktor ini memiliki efek positif pada kinerja pekerja dan daya tarik negara untuk bakat, dua aspek pasar tenaga kerja yang tumbuh lebih penting karena kekurangan bakat tampak di depan mata (The_Global_Competitiveness_Report, 2018).

The_Global_Competitiveness_Report (2018) menjelaskan bahwa pilar kedelapan yaitu Pengembangan pasar keuangan. Sektor keuangan yang efisien mengalokasikan sumber daya yang dihemat oleh penduduk suatu negara, serta mereka yang memasuki perekonomian dari luar negeri, ke proyek-proyek kewirausahaan atau investasi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan tertinggi daripada yang terhubung secara politik. Investasi bisnis sangat penting untuk produktivitas. Oleh karena itu, perekonomian membutuhkan pasar keuangan yang canggih yang dapat menyediakan modal untuk investasi sektor swasta dari sumber-sumber seperti pinjaman dari sektor perbankan yang sehat, bursa

efek yang diatur dengan baik, modal ventura, dan produk keuangan lainnya. Untuk memenuhi semua fungsi tersebut, sektor perbankan harus dapat dipercaya dan transparan, dan seperti yang telah dijelaskan baru-baru ini bahwa pasar keuangan memerlukan regulasi yang tepat untuk melindungi investor dan pelaku ekonomi lainnya secara luas.

Pilar kesembilan yaitu Kesiapan teknologi. Menurut *The_Global_Competitiveness_Report* (2018), pilar kesiapan teknologi mengukur kelincahan ekonomi dalam mengadopsi teknologi yang ada untuk meningkatkan produktivitas industrinya, dengan penekanan khusus pada kapasitasnya untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan sehari-hari dan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan inovasi untuk daya saing. Apakah teknologi yang digunakan telah atau belum dikembangkan dalam batas-batas negara tidak relevan dengan kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas. Poin utamanya adalah bahwa perusahaan yang beroperasi di negara tersebut perlu memiliki akses ke produk dan cetak biru canggih dan kemampuan untuk menyerap dan menggunakannya. Diantara sumber utama teknologi asing, penanaman modal asing langsung (FDI) sering memainkan peran kunci, terutama untuk negara-negara pada tahap perkembangan teknologi yang kurang maju.

Selanjutnya Ukuran pasar, dimana pilar kesepuluh ini mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar

memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Secara tradisional, pasar yang tersedia bagi perusahaan telah dibatasi oleh batas-batas negara. Di era globalisasi, pasar internasional telah menjadi pengganti pasar domestik, terutama negara-negara kecil. Dengan demikian ekspor dapat dianggap sebagai pengganti permintaan domestik dalam menentukan ukuran pasar bagi perusahaan suatu negara. Dengan memasukkan pasar domestik dan luar negeri dalam ukuran pasar kami, kami memberikan kredit kepada ekonomi dan wilayah geografis yang didorong ekspor (seperti Uni Eropa) yang terbagi menjadi banyak negara tetapi memiliki satu pasar bersama (The_Global_Competitiveness_Report, 2018).

Sementara itu pada kategori kesebelas yaitu Kecanggihan bisnis, The_Global_Competitiveness_Report (2018) menjelaskan bahwa kecanggihan bisnis menyangkut dua elemen yang terkait erat: kualitas jaringan bisnis keseluruhan suatu negara dan kualitas operasi dan strategi masing-masing perusahaan. Faktor-faktor ini sangat penting bagi negara-negara pada tahap perkembangan yang lebih maju ketika, sebagian besar, sumber-sumber peningkatan produktivitas yang lebih mendasar telah habis. Kualitas jaringan bisnis dan industri pendukung suatu negara, yang diukur dengan kuantitas dan kualitas pemasok lokal dan tingkat interaksi mereka, penting untuk berbagai alasan. Ketika perusahaan dan pemasok dari sektor tertentu saling berhubungan dalam kelompok yang berdekatan secara geografis, disebut cluster, efisiensi meningkat,

peluang lebih besar untuk inovasi dalam proses dan produk diciptakan, dan hambatan masuk bagi perusahaan baru berkurang.

Sedangkan pada pilar kedubelas yaitu Inovasi. Inovasi sangat penting bagi ekonomi karena mereka mendekati batas pengetahuan, dan kemungkinan menghasilkan nilai lebih dengan hanya mengintegrasikan dan mengadaptasi teknologi eksogen cenderung menghilang. Dalam ekonomi ini, perusahaan harus merancang dan mengembangkan produk dan proses mutakhir untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan bergerak ke arah aktivitas nilai tambah yang lebih tinggi. Kemajuan ini membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan inovatif dan didukung oleh sektor publik dan swasta. Secara khusus, ini berarti investasi yang cukup dalam penelitian dan pengembangan (R&D), terutama oleh sektor swasta; kehadiran lembaga penelitian ilmiah berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk membangun teknologi baru; kolaborasi yang luas dalam penelitian dan pengembangan teknologi antara universitas dan industri; dan perlindungan kekayaan intelektual (The_Global_Competitiveness_Report, 2018).

Indeks daya saing memiliki skor antara 1 hingga 100, dimana nilai skor rata-rata yang lebih tinggi berarti tingkat daya saing yang lebih tinggi pula. Hasil pembobotan terhadap indeks daya saing ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu: rendah, sedang dan tinggi. Menurut Saputri & Sirait (2020), indeks daya saing dikatakan rendah jika nilainya lebih kecil sama dengan 50, daya saing rendah

jika skornya 51 hingga 75, dan disebut tinggi daya saingnya ketika skornya lebih besar dari 75 (tabel 2.1).

Tabel 2.1. Klasifikasi Indeks Daya Saing

Interval Nilai	Klasifikasi
≤ 50	Rendah
51 – 75	Sedang
> 75	Tinggi

Sumber: Saputri & Sirait (2020)

Klasifikasi daya saing yang tinggi pada suatu negara tidak terlepas dari peran dan fungsi sektor pendidikan, oleh karenanya diperlukan pembangunan pada sektor ini secara utuh dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek manajemen pendidikan. Wardhana (2007) menjelaskan bahwa dalam era pembangunan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul, diperlukan suatu manajemen pendidikan yang profesional untuk bisa bersaing dalam menghadapi era globalisasi.

Dengan adanya persaingan global maka haruslah memunculkan berbagai potensi bagi masyarakat dan individu untuk kreatif (Istifadah, 2012; Uddin, 2022). Sementara itu, salah satu syarat untuk memasuki globalisasi yaitu profesionalitas yang sangat dibutuhkan pada semua sektor termasuk pendidikan, industri, perdagangan, politik, sosial dan arus informasi. Disamping itu keahlian-keahlian khusus juga dibutuhkan untuk meningkatkan

profesionalitas misalnya keahlian intelektual melalui penelitian-penelitian yang berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan peluang sebagaimana dikemukakan oleh Wardhana (2007).

Dimana Wardhana (2007) mengemukakan bahwa untuk menghadapi pasar dunia yang semakin terbuka maka sektor pendidikan perlu dengan cepat melakukan adaptasi dimana semua pihak baik guru, keluarga, sekolah dan masyarakat yang berkepentingan pada sektor pendidikan ini baik langsung maupun tidak langsung perlu melakukan evaluasi internal agar lebih mampu berkompetisi dan berinovasi dalam menawarkan program-program yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Keterlibatan stakeholders pendidikan ini sangat diperlukan dalam menghadapi globalisasi khususnya globalisasi pendidikan. Dengan demikian diperlukan kebijakan dan keputusan untuk mendorong beroperasinya pasar bebas sebagaimana dikemukakan oleh Triwiyanto (2017) bahwa keputusan-keputusan dalam sektor pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan arus global, termasuk di dalamnya sistem pendidikan. Sistem pendidikan juga mengalami pergeseran-pergeseran sebagai upaya adaptif. Sistem pendidikan tidak sekadar lokal negara, sekarang telah melintasi batas-batas negara. Pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia menunjukkan operasi sistem pendidikan atas kendali arus struktural global.

Pendidikan dalam konteks saat ini harus terintegrasi dengan dinamisasi yang berkembang terutama di era global. Bahkan

globalisasi ini tidak saja berpengaruh terhadap dinamika yang berkembang di dunia ekonomi tetapi juga dunia pendidikan. Triwiyanto (2017) mengemukakan bahwa sistem pendidikan menghadapi persoalan yang tidak ringan. Dimana globalisasi telah mendorong terjadinya kompetisi bagi lembaga pendidikan yang tidak bersifat lokal atau regional saja melainkan internasional. Kompetisi global tersebut membawa dampak di sektor sistem pendidikan, salah satunya internasionalisasi pendidikan.

Internasionalisasi pendidikan inilah yang tidak bisa diabaikan oleh pengelola dan insan pendidikan untuk secara terus-menerus beradaptasi dengan lingkungannya yang cenderung terus mengalami perubahan. Internasionalisasi pendidikan ini juga tidak terlepas dari adanya dua unsur yaitu era pendidikan dan informasi. Wardhana (2007) menjelaskan bahwa dominasi pengaruh era industri dan informasi perlu dicermati dan diantisipasi oleh dunia pendidikan. Pengaruh era industri dapat dilihat dari pergeseran pola persaingan, dimana suatu bangsa tidak dapat mengandalkan pada keunggulan komparatif saja karena hanya mengandalkan pada perkembangan sumberdaya alam. Pergeseran terjadi dari kekuatan sumberdaya alam menuju kekuatan pada sumber daya manusia.

Agar suatu bangsa sanggup mengembangkan keunggulan kompetitifnya maka peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan dan dijalankan. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor pendidikan menjadi pengemban dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Sedangkan era informasi berkaitan erat dengan kemajuan teknologi. Dimana pada era global ini, sektor pendidikan harus selalu diaktualisasikan seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi. Disinilah pentingnya lembaga pendidikan dalam membekali dan memfilter sumber daya manusia Indonesia dari pengaruh negatif masuknya budaya asing sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan informasi saat ini.

C. Faktor-faktor Indeks Daya Saing

Daya saing suatu bangsa tidak terlepas dari pendidikan sumber daya manusianya. Hingga saat ini, sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah mutu atau kualitas pendidikan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya mutu lulusan di hampir semua jenjang pendidikan formal dengan indikator antara lain: (1) rendahnya nilai rata-rata yang dicapai; (2) rendahnya daya serap peserta didik dalam memahami bahan pelajaran yang diberikan serta (3) rendahnya tingkat keterkaitan dan kesesuaian antara lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja. Ketiga hal tersebut disebabkan oleh: (1) faktor dana; (2) faktor sarana dan prasarana pendidikan; (3) faktor kurikulum; (4) faktor sistem administrasi dan manajemen pendidikan; (5) faktor mutu guru serta (6) faktor internal peserta didik misalnya rendahnya minat baca (Wardhana, 2007).

Pendidikan dapat merubah kondisi global, sebagaimana dikemukakan oleh Amdam (1996), bahwa secara global dua proses yang mencolok tentang pendidikan manajemen modern. Pertama,

pendidikan manajemen berubah dengan cepat untuk memenuhi tantangan baru dari bisnis dan pemerintah dan untuk meningkatkan daya saing. Kedua, pendidikan manajemen telah menjadi salah satu bidang dengan pertumbuhan tercepat di pendidikan tinggi. Kasuistik di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, bahwa manajemen pendidikan dan daya saing memberikan gambaran yang luas dan ada pengaruh kuat.

Menurut Rusdiana (2013), dalam era global diperlukan insan-insan atau sumber daya insani yang kredibel, kompeten dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat dinamis. Dengan penguasaan terhadap kreativitas, inovasi, keterampilan dan teknologi yang didukung oleh kemampuan manajerial maka dapat bermanfaat untuk mewujudkan daya saing bangsa di tengah persaingan yang sangat ketat. Keunggulan komparatif memang diperlukan, namun demikian keunggulan kompetitif menjadi prioritas utama untuk mendapat kemenangan dalam persaingan global.

Demikian halnya dengan Ratten & Dana (2019) yang menjelaskan, pada sebagian besar negara, kewirausahaan telah dibawa ke garis depan diskusi ekonomi dan kebijakan. Sebagai bagian dari penekanan pada kewirausahaan ini, bisnis semakin mendukung kemitraan publik-swasta yang menguntungkan sektor masyarakat yang lebih besar. Selain itu, lebih banyak wirausahawan berfokus pada bagaimana aktivitas mereka

memengaruhi bagian lain dari masyarakat dan mekanisme yang menambah nilai sosial.

Selanjutnya dikemukakan, ada lebih banyak panggilan untuk penelitian kewirausahaan yang menanamkan proses dan pendekatan kontekstual. Hal ini disebabkan studi kewirausahaan perlu mengenali bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor sosial kadang-kadang diasumsikan dalam penelitian kewirausahaan dan tidak secara khusus dipelajari secara rinci. Relevansi masyarakat perlu diperiksa dalam hal kewirausahaan.

Korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Lambsdorf (2006) memiliki dampak negatif, meskipun kecil namun signifikan terhadap daya saing ekspor terutama di Amerika Serikat. Demikian juga dengan teori yang dikemukakan oleh Dutta & Mishra (2005); Mostafa & Bhuiyan (2012) bahwa korupsi dapat mengganggu ketidaksempurnaan pasar. Lambsdorf (2006) juga mengemukakan bahwa daya saing merupakan isu yang sangat penting dan menjadi strategi nasional. Disamping itu daya saing bangsa menuntut adanya efisiensi dalam semua aspek, sedangkan korupsi berkontribusi pada terjadinya inefisiensi.

Mengingat korupsi dapat merugikan negara (Méon & Weill, 2008) maka pada beberapa negara yang korupsinya rendah dapat mendorong peningkatan daya saing nasional. Dengan kata lain, ada hubungan antara kesehatan ekonomi suatu negara yang diwakili oleh posisi daya saing nasional dan kurangnya korupsi (Ali, 2011).

Menurut Useche & Reyes (2020), korupsi menjadi fenomena dunia yang memiliki konsekuensi negatif baik pada tingkat individu maupun agregat. Menurut Rajagukguk (2016) korupsi berdampak negatif pada tingkat daya saing dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mengurangi investasi keuangan karena dikorupsi oleh koruptor sehingga terdapat potensi pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Indeks Pendidikan

Bagi pemerintah Indonesia, pendidikan merupakan aspek penting yang keberadaannya seiring dengan lahirnya Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang secara eksplisit tercantum pada alenia keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia itu dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga pada Undang-undang Dasar 1945, bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Oleh karenanya pemerintah memfasilitasinya dalam bentuk pendidikan gratis terutama untuk pendidikan dasar.

Sektor pendidikan merupakan sektor penting di Indonesia, bahkan keberadaannya dilindungi oleh undang-undang misalnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012. Kedua undang-undang ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengatur dan memajukan pendidikan mengingat pendidikan terkait dengan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia

ini merupakan insan pembangunan yang menjadi aktor utama terwujudnya daya saing bangsa di tingkat global.

Untuk menganalisis kemajuan sektor pendidikan, dalam studi ini dijelaskan oleh indeks pendidikan. Kemenkeu (2020) menjelaskan bahwa indeks pendidikan merupakan aspek penting selain indeks kesehatan dan indeks infrastruktur untuk membangun Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pendidikan mencakup banyak aspek yaitu rata-rata lama sekolah, total ruang kelas, rasio ruang kelas kategori baik, peta mutu pendidikan, angka partisipasi murni dan nilai ujian nasional. Disamping itu, indeks pendidikan berguna untuk mengukur kinerja pelayanan pendidikan oleh pemerintah kepada segenap masyarakat.

Skor indeks pendidikan ini semakin mendekati angka 100 maka berarti kondisinya semakin bagus, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad (2018) bahwa UNESCO mengkategorikan dalam 3 interval angka indeks yang dikonversi dalam interval angka 1-100. Jika nilai indeks pendidikan lebih besar sama dengan 95 maka negara termasuk pada klasifikasi tinggi. Disebut dalam kategori sedang jika nilai angka indeksnya interval 80 hingga 94, dan termasuk dalam kategori rendah jika nilai indeksnya pada kisaran kurang dari 80 (tabel 2.2).

Tabel 2.2. Klasifikasi Indeks Pendidikan

Interval Nilai	Klasifikasi
< 80	Rendah
80 – 94	Sedang
≥ 95	Tinggi

Sumber: Ahmad (2018)

Pentingnya indeks pendidikan yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggara pendidikan baik swasta maupun pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Layanan yang dimaksud bersifat holistic dan terintegrasi dengan proses pembelajaran misalnya layanan kurikulum dan pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh Triwiyanto (2017), bahwa kegiatan pendidikan terutama di sekolah banyak melibatkan unsur sumber daya manusia dan sumberdaya lain di dalamnya.

Selanjutnya dikemukakan oleh Triwiyanto (2017) bahwa keterlibatan dalam system pendidikan dan sekolah menjadikan adanya kesiapan yang baik untuk memberikan layanan. Layanan pendidikan di sekolah adalah kegiatan system pendidikan yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan publik. Dalam bidang pendidikan, layanan disediakan dalam bentuk: (1) layanan kurikulum dan pembelajaran; (2) kesiswaan atau peserta didik; (3) pendidik dan tenaga pendidikan; (4) keuangan; (5) sarana prasarana dan (6) partisipasi masyarakat.

Layanan pendidikan merupakan aspek penting dalam pendidikan di universitas dan memiliki nilai investasi. Keberhasilan pada sektor pendidikan ini tidak bisa dipisahkan dari kualitas layanannya sehingga dapat berimplikasi positif dalam meningkatkan kemajuan sektor-sektor lainnya. Al-Dulaimi (2016) menjelaskan bahwa pendidikan dipandang sebagai faktor utama pembangunan ekonomi, sosial dan manusia yang berkelanjutan di tingkat global. Pendidikan merupakan unsur fundamental untuk menyusun kapasitas dan pengembangan keterampilan melalui perolehan kualifikasi, kemajuan teknologi, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia suatu negara.

Pendidikan di universitas merupakan investasi yang jelas dalam sumber daya manusia dan proses dan layanan pendidikan berkualitas tinggi sangat penting untuk pengembangan status budaya, sosial dan ekonomi negara manapun. Oleh karena itu, di manapun di dunia ini, pendidikan universitas dianggap sebagai salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pengembangan tenaga kerja yang sangat terampil, yang akan menjadi mesin pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bangsa manapun termasuk Indonesia. Bahkan pendidikan menjadi penentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi nasional.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat beralasan karena sumber daya manusia sebagai operator

pembangunan sehingga peran dan fungsinya sebagai pelaku ekonomi sangat mempengaruhi peningkatan hasil pembangunan pada suatu perekonomian dalam waktu tertentu misalnya 1 tahun. Selanjutnya enam layanan pendidikan sebagaimana dikemukakan Triwiyanto (2017) di atas dapat dijelaskan dan dirinci pada bagian berikut ini.

Pertama, layanan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas dan dilaksanakan dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, social emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni.

Kedua, layanan kesiswaan atau peserta didik. Layanan kesiswaan merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai matang di sekolah. Contoh kegiatan yang merupakan bagian dari layanan kesiswaan yaitu layanan konseling, kegiatan ekstra dan kokurikuler, pembinaan prestasi unggulan dan melakukan pelacakan atau penjejukan alumni.

Ketiga, layanan pendidik dan tenaga pendidikan. Layanan pendidik dan tenaga pendidikan merupakan aktivitas yang

dilakukan dari pendidik dan tenaga pendidikan mulai dari masuk menjadi bagian dari organisasi sampai dengan masa tugas atau pensiun secara terencana. Tenaga pendidik dan pendidikan dalam studi ini yaitu guru dan dosen sebagai tenaga professional yang bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Keempat, layanan keuangan. Dalam konteks ini layanan keuangan disebut juga dengan layanan pembiayaan pendidikan, yaitu layanan terhadap fungsi-fungsi keuangan atau pembiayaan pendidikan yang di dalamnya memuat perolehan atas sumber-sumber dana pendidikan serta cara mengalokasikannya. Sebagai organisasi sector publik, lembaga pendidikan tidak bias mengabaikan layanan keuangan atau layanan pembiayaan pendidikan ini. Sedangkan bentuk dari layanan keuangan atau pembiayaan pendidikan ini yaitu: penganggaran pendidikan, anggaran program, anggaran kinerja, pencatatan akuntansi dan auditing. Pencatatan di dalamnya memuat bagan perkiraan, buku besar, jurnal dan buku cek yang mestinya bersifat terbuka dan mudah diakses bagi yang membutuhkan.

Kelima, layanan sarana prasarana. Sebagai barang atau benda bergerak, sarana dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi unit kerja pendidikan misalnya mobil, computer, kertas, tinta printer dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana pendidikan yaitu barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pendidikan misalnya gedung perkantoran dan gedung perkuliahan.

Keenam, partisipasi masyarakat. Layanan partisipasi masyarakat atau sering juga disebut hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat memperlihatkan upaya bersama-sama membangun pendidikan. Dengan kata lain bahwa kemajuan dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan partisipasi baik dalam pelaksanaan maupun pengawasannya. Pentingnya pengawasan sebagai bentuk dari evaluasi pendidikan yang tidak saja menjadi tanggung jawab pengelola pendidikan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa layanan partisipasi masyarakat bertujuan untuk membangun lembaga pendidikan yang maju dan lebih baik. Wujud layanan tersebut lebih menekankan pada mengelola komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Media-media atau wadah-wadah komunikasi tersebut sebenarnya sudah ada, misalnya melalui persatuan orang tua/wali peserta didik, komite atau dewan sekolah, dewan pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bidang pendidikan. Penjelasan di atas relevan dengan teori Wardhana (2007) yang memperluas bahwa budaya literasi dan minat baca merupakan

tugas guru, namun demikian diperlukan partisipasi aktif orang tua/wali untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik/siswa.

E. Indeks Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh perusahaan yang ingin memperoleh keuntungan, maka mereka perlu mensinergikan sumberdaya yang ada untuk mencapai keuntungan itu. Proses dalam mensinergikan sumberdaya inilah yang disebut dengan kewirausahaan. Jadi menurut Drucker (2002) kewirausahaan bukanlah suatu ilmu atau seni, melainkan terkait dengan latihan dan praktik. Sedangkan Franco (2020); Szabo & Herman (2012) mengemukakan bahwa inovasi merupakan alat untuk melaksanakan kewirausahaan, yang sekaligus menjadi ciri utama seorang wirausahawan yaitu inovasi ini. Tanpa inovasi kewirausahaan sulit untuk dipraktikkan dan tentunya sulit berkembang untuk mencari keuntungan.

Dalam kaitannya dengan indeks kewirausahaan, Ács et al. (2018) menjelaskan bahwa indeks kewirausahaan dalam pengertian global merupakan alat penting untuk membantu negara menilai dan mengevaluasi ekosistem mereka secara akurat untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dasar penilaian terhadap indeks kewirausahaan dikembangkan menjadi 3 kategori yaitu: sikap kewirausahaan, kemampuan kewirausahaan dan aspirasi kewirausahaan. Ketiga kategori ini kemudian dikembangkan lagi menjadi 14 yang dikenal dengan istilah 14 pilar kewirausahaan.

Masih menurut Ács et al. (2018), ke-14 pilar kewirausahaan ini yaitu: kemampuan dalam mempersepsi peluang, bisnis *startup*, persepsi terhadap risiko, jejaring dunia, budaya, melaksanakan *startup*, teknologi, sumber daya manusia, persaingan, inovasi terhadap produk, inovasi terhadap proses, pertumbuhan berkelanjutan, berwawasan internasional dan risiko modal. Aspek yang terakhir yaitu risiko modal menjadi permasalahan yang secara umum dihadapi oleh pebisnis pemula termasuk bisnis *startup* di Indonesia, sehingga diperlukan keberpihakan pemerintah dan lembaga peduli lainnya untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan akses pasar kepada pebisnis pemula.

Untuk mengantisipasi kesulitan permodalan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2019 memberi bantuan bagi wirausaha pemula yang tertuang dalam Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Nomor 12 tahun 2019 tentang Petunjuk Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula tahun 2019. Kemudian program bantuan bagi pelaku usaha mikro, melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2020 menyalurkan bantuan berdasar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 serta Surat Edaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 267/SM/VIII/2020.

Keberpihakan pemerintah dalam bentuk bantuan modal usaha kepada pelaku usaha ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan indeks kewirausahaan di tanah air. Menurut Ibrahim et al. (2019) indeks kewirausahaan digunakan untuk mengukur prospek kesuksesan seorang wirausahawan. Sedangkan dalam konteks *global entrepreneurship index*, hasil indeks dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu: rendah, sedang dan tinggi sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Klasifikasi Indeks Kewirausahaan

Interval Nilai	Klasifikasi
< 62	Rendah
62 – 82	Sedang
> 82	Tinggi

Sumber: Ibrahim et al. (2019)

Kesuksesan seorang wirausahawan sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim et al. (2019) di atas sudah barang tentu mudah untuk diucapkan namun sulit untuk direalisasikan. Bahkan banyak pendapat yang sangat yakin mengungkapkan bahwa modal utama wirausaha yaitu uang. Tentu pendapat ini tidak selalu benar adanya sebagaimana dikemukakan oleh Alsyaferdi (2010) bahwa modal utama berusaha adalah kemauan dan kreativitas, bukan uang. Kemudian Zimmerer et al. (2009) memperluas bahwa perusahaan-perusahaan kecil bahkan baru berdiri sudah harus

berhadapan dengan globalisasi dimana produk yang dihasilkan harus berorientasi global jika ingin berkembang dan maju.

Selanjutnya Zimmerer et al. (2009) mengemukakan bahwa pada beberapa dasawarsa yang lalu perusahaan-perusahaan kecil mungkin hanya harus memperhatikan para pesaing mereka yang berlokasi enam blok jauhnya dari mereka. Kini, mereka mesti menghadapi persaingan yang sengit dari perusahaan-perusahaan yang mungkin berlokasi enam zona waktu jauhnya. Akhirnya para wirausahawan mendapati diri mereka berada di bawah tekanan untuk memperluas pasarnya ke pasar internasional dan membangun usaha mereka tanpa batas.

Kajian tentang kewirausahaan serta usaha kecil dan menengah menjadi perhatian khusus ditengah persaingan usaha di era global saat ini (Chell, 2001; Radovic-Markovic & Tomaš, 2021; Rugman & Wright, 1999). Meskipun dengan mengglobal menjadi beban tersendiri bagi perusahaan kecil, namun demikian terdapat manfaat dan keuntungan bagi perusahaan kecil dengan mengglobal sebagaimana dikemukakan oleh Zimmerer et al. (2009) bahwa bisnis global bisa dapat memperoleh manfaat-manfaat yaitu:

- a. Mengimbangi penurunan penjualan dalam pasar domestik.

Pasar di luar negeri mungkin mengalami ledakan, sementara di dalam negeri mengalami kemerosotan. Dengan cara ini bisnis global bertindak sebagai penyeimbang terhadap penurunan penjualan domestik, sehingga penjualan dapat dikondisikan jika terjadi penurunan penjualan pada wilayah tertentu. Tujuan

pemasaran tidak boleh hanya mengandalkan pada satu daerah atau Negara saja, melainkan juga harus membuka wilayah dan Negara yang lain untuk memasarkan produk perusahaan.

b. Meningkatkan penjualan dan laba.

Dua kekuatan bekerjasama untuk membuat bisnis global menjadi semakin menarik: peningkatan penghasilan sehingga potensi penjualan kini mungkin dapat diwujudkan, dan kesadaran bahwa sebagian besar populasi planet ini tinggal dan hidup di luar batas-batas suatu negara tertentu. Penjualan sangat erat hubungannya dengan keuntungan atau laba. Penjualan merupakan perkalian antara harga dengan kuantitas barang atau produk yang terjual. Sedangkan laba atau keuntungan diperoleh dari total biaya atau pengeluaran dikurangi total pendapatan.

Semakin meningkat penjualan dalam satuan unit uang, dan dengan biaya yang minimal maka keuntungan perusahaan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian penjualan, biaya dan keuntungan saling terkait satu dengan yang lain.

c. Memperpanjang daur kehidupan produk.

Beberapa perusahaan telah dapat membuat produk yang mendekati tahap dewasa dalam daur hidup produknya di suatu negara dan kemudian berhasil menjual produk tersebut di pasar luar negeri. Menurut Kamthe & Verma (2013); Udokporo (2021) bahwa daur hidup produk dibedakan menjadi 5 tahap yaitu:

1. Tahap pengembangan: Tahap pengembangan dari siklus hidup produk terjadi ketika sebuah perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Sebuah produk umumnya mengalami beberapa perubahan yang melibatkan banyak uang dan waktu selama pengembangan, sebelum diekspos ke target pelanggan melalui uji pasar. Pada tahap ini, penjualan adalah nol dan pendapatan negatif.
2. Tahap pengenalan: Tahap pengenalan siklus hidup produk terjadi ketika produk pertama kali diperkenalkan ke pasar sasarnya. Pengeluaran besar untuk promosi dan iklan adalah hal biasa. Sebuah perusahaan harus siap untuk menghabiskan banyak uang dan hanya mendapatkan sebagian kecil dari itu kembali. Pada tahap ini, penjualan rendah, biaya produksi cenderung tinggi dan laba negatif atau sangat rendah.
3. Tahap pertumbuhan: Tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk terjadi ketika permintaan akan produk baru mulai meningkat dengan cepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada peningkatan pangsa pasar karena inovator beralih dari percobaan ke pembelian ulang jika mereka puas dengan produk meskipun inovator dapat mempengaruhi orang lain dari mulut ke mulut, yang sering dianggap sebagai cara komunikasi yang paling efektif. Pasar baru yang berkembang mengingatkan perhatian persaingan. Pada

tahap ini, penjualan meningkat, pendapatan meningkat, dan laba meningkat.

4. Tahap kedewasaan: Tahap kedewasaan dari siklus hidup produk terjadi ketika permintaan telah mencapai puncak yang direncanakan atau tidak direncanakan, dan persentase bahwa ia akan membeli produk telah tercapai. Tahap siklus hidup ini adalah fase terpanjang untuk sebagian besar produk. Persaingan paling ketat selama tahap ini. Pada tahap ini, penjualan mencapai puncaknya, dan pangsa pasar mungkin tinggi.
 5. Tahap penurunan: Tahap penurunan siklus hidup produk terjadi ketika penjualan terus mengalami penurunan yang kuat dan keuntungan mengikis dengan cepat menuju titik nol. Alasan khas untuk penurunan produk adalah masuknya produk baru ditambah dengan penurunan minat konsumen pada produk tertentu
- d. Mengurangi biaya manufaktur.
- Di dalam industri yang ditandai dengan tingginya tingkat biaya tetap, perusahaan yang melakukan ekspansi ke pasar global dapat menurunkan biaya manufaktur dengan cara menyebarkan biaya tetap ini ke dalam berbagai unit yang lebih banyak.
- e. Menurunkan biaya produk.

Banyak perusahaan membeli barang atau bahan baku dengan harga paling rendah mengharuskan mereka berbelanja di pasar global. Harga yang rendah terhadap bahan baku ini sekaligus

merupakan implementasi dari efisiensi biaya yang menjadi syarat utama dalam persaingan global sebagaimana dikemukakan oleh Antriyandarti (2015); Kumar & Chadee (2002). Dimana menurut Antriyandarti (2015), persaingan terkait dengan efisiensi penggunaan dana dan sebaliknya alokasi dana yang efisien menjadi syarat utama dalam persaingan global. Ringkasnya, hanya perusahaan dan negara yang mampu menglokasikan sejumlah dana secara efisien dalam proses produksi yang mampu bersaing

f. Memperbaiki posisi saing dan meningkatkan reputasi.

Menghadapi persaingan-persaingan terberat di dunia membuat perusahaan mau tidak mau selalu mengasah ilmu bersaingnya. Reputasi tidak datang begitu saja, melainkan dibangun oleh sistem yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Misalnya bagian personalia menyiapkan sumber daya manusianya, bagian keuangan menyediakan sumber-sumber pendanaannya, bagian operasional melaksanakan transformasi dari input produksi menjadi output produksi dan bagian pemasaran menjual produk di pasar nasional dan internasional. Bagian-bagian ini saling terintegrasi sehingga produk perusahaan benar-benar dapat terserap di pasar sehingga dapat meningkatkan keuntungan.

g. Meningkatkan kualitas.

Memenuhi kepuasan pelanggan di pasar global jauh lebih sulit dibanding pelanggan yang tinggal di lingkup suatu negara.

Salah satu alasan produk Jepang dapat berhasil di seluruh dunia adalah karena mereka membuat produk mereka untuk memenuhi kepuasan pelanggan di negeri asalnya, yang menghendaki kualitas yang sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan yang bersaing di pasar global segera dan terus belajar bagaimana cara meningkatkan kualitas mereka untuk mencapai standar kelas dunia.

Kualitas merupakan segala-galanya bagi perusahaan jika ingin bersaing di tingkat dunia. Dengan kualitas yang tinggi produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat bersaing dengan produk luar negeri. Kualitas bukan saja menjadi tanggung jawab pada bagian tertentu saja, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak atau semua bagian di perusahaan yang selanjutnya masuk pada bahasan atau kajian tentang *Total Quality Management*.

h. Menjadi lebih berorientasi kepada pelanggan.

Dalam banyak teori dikemukakan bahwa pelanggan atau konsumen merupakan raja sehingga perlu dilayani dan terus ditingkatkan kepuasan supaya mereka ini loyal dan terus menjadi pelanggan perusahaan. Pelanggan tidak hanya pada area atau wilayah dimana perusahaan itu berada tetapi juga menjangkau wilayah di luar perusahaan kalau konteksnya perusahaan atau badan hukum perusahaan. Bahkan secara makro, perusahaan tidak saja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di dalam negeri tetapi juga pelanggan di luar negeri atau ekspor. Kegiatan ekspor inilah yang kemudian dapat

mendatangkan valuta asing (valas) sehingga devisa suatu negara dapat meningkat.

Peningkatan devisa suatu negara pada titik tertentu dapat memperkuat perekonomian nasional sehingga akan memperkuat posisi suatu negara dalam berinteraksi dengan perekonomian atau perdagangan luar negeri yang tidak saja ekspor, namun juga impor. Dari perdagangan luar negeri inilah setiap negara menginginkan terjadinya surplus perdagangan dan surplus perdagangan ini dapat memperkuat basis ekonomi suatu negara dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Kedua peningkatan ini sangat lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia.

F. Indeks Korupsi

Dalam konteks ekonomi, korupsi tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan masyarakat secara luas karena kesejahteraan masyarakat yang diukur oleh terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran terhambat oleh perilaku dan perbuatan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. UU 31/1999 (1999) mendefinisikan bahwa korupsi merupakan tindakan seseorang baik secara individu maupun korporasi, dimana tindakannya ini dalam rangka memperkaya pribadi, kelompok dan korporasinya serta berpotensi mendatangkan kerugian bagi negara dan perekonomian bangsa secara keseluruhan.

Berdasar definisi tersebut tindakan korupsi sangat jelas mengganggu keuangan negara yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan perekonomian secara nasional. Transparency International (2017) menyebutkan bahwa perilaku pejabat publik pada tindak pidana korupsi ini akan berdampak negatif terhadap penurunan tingkat kepercayaan masyarakat, runtuhnya alam demokrasi, pembangunan terhambat, ketimpangan sosial yang semakin tinggi, meningkatkan kemiskinan dan perpecahan sosial.

Dengan demikian, pengertian korupsi sangat bergantung pada titik tekan atau sudut pandang sebagaimana menurut Prasetyo (2013) bahwa pemahaman korupsi ini lebih melihat dimensi manipulasi perekonomian yang membahayakan kepentingan umum. Manipulasi sering kali dijumpai dalam kemasan kebijakan pemerintah. Akibatnya, terjadilah fenomena legalisasi atas penyimpangan-pengimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam memperoleh keuntungan. Korupsi juga merupakan akibat dari praktik patronase.

Sistem yang disebut dengan patronase ini sangat berbahaya dalam suatu pemerintahan dan kenegaraan karena sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dana yang semestinya dialokasikan untuk kemakmuran masyarakat hanya dinikmati oleh segelintir oknum tertentu sehingga menjadi ancaman khususnya bagi kehidupan demokrasi (Madung, 2016). Karena menurut Prasetyo (2013) praktik pemerintahan yang

demokratis mengasumsikan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat dan diimplementasi semata-mata hanya diorientasikan untuk kepentingan rakyat atau kebaikan bersama.

Meskipun demikian dalam praktiknya sering dijumpai (termasuk juga di Indonesia) kebijakan pemerintah seringkali justru mengingkari kepentingan masyarakat. Inilah yang membawa bencana bagi sebagian besar masyarakat dan negara. Demokratisasi di Indonesia memang sudah semestinya dilakukan di tubuh lembaga-lembaga pemerintahan. Alasan utamanya yaitu persoalan-persoalan yang muncul dan menghancurkan tatanan hidup berbangsa dan bernegara justru bersumber dari jajaran pemerintah.

Selanjutnya Prasetyo (2013) juga mengemukakan bahwa korupsi lebih banyak dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan sendiri, maka aktor yang harus menjadi sasaran utama untuk terus menerus dikontrol yaitu para pemegang kekuasaan, mulai dari penguasa di tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dalam hal ini, kontrol terhadap pemerintah tidak mungkin mengandalkan kontrol dari dalam diri institusi pemerintah sendiri. Kekuatan eksternal, khususnya gerakan *civil society* harus menjadi kekuatan dalam mewujudkan kondisi *checks and balances*.

Kemudian korupsi dalam penelitian ini diukur oleh indeks korupsi, dimana menurut Kuncoro (2015), indeks korupsi memfokuskan diri pada tindak pidana korupsi pada sektor publik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang pada kantor-kantor

publik yang berorientasi pada kepentingan individual atau pribadi. Pernyataan Kuncoro (2015) ini relevan dengan pernyataan Hawthorne (2015); Suyatmiko & Ratnaningtyas (2017) bahwa korupsi tidak saja menjadi penghalang pembangunan, tetapi juga merusak moral bangsa dan menurunkan daya saing kota dan egera dalam arti yang luas.

Selanjutnya dijelaskan bahwa nilai indeks korupsi menggunakan skala nol (0) hingga 100, di mana angka nol menunjukkan bahwa suatu negara berada pada klasifikasi sangat korup dan 100 yang berarti negara dalam kondisi atau klasifikasi sangat bersih. Menurut KPK (2020), hasil perhitungan indeks persepsi korupsi dibedakan menjadi 4 interval nilai dengan penyebutan klasifikasi yang berbeda-beda sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Kategori Indeks Persepsi Korupsi

Interval Nilai	Klasifikasi
81,26 – 100,00	Bersih
62,51 – 81,25	Cukup Bersih
43,76 – 62,50	Kurang Bersih
25,00 – 43,75	Korup

Sumber: Kuncoro (2015)

Negara-negara yang memiliki tingkat korupsi rendah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kesejahteraan warga negaranya. Sebagaimana dikemukakan oleh Setiyono (2018) bahwa

di negara-negara Nordik yaitu Denmark, Finlandia, Swedia dan Norwegia mampu menghantarkan rakyatnya mencapai derajat kebahagiaan hidup yang tinggi karena berhasil menekan korupsi. Dampak positif ketika Norwegia dan Denmark berhasil dalam mengatasi korupsi yaitu angka indeks korupsi pada kedua negara ini rendah.

Kinerja ekonomi Norwegia dan Denmark juga meningkat seperti GDP riil per kapita, harapan hidup sehat, rasa memiliki terhadap seseorang untuk diandalkan, rasa percaya diri, kebebasan yang dirasakan untuk membuat pilihan hidup serta kemurahan hati juga meningkat ketika kedua negara ini terbebas dari korupsi. Dengan demikian, rendahnya korupsi dapat mempengaruhi peningkatan kinerja ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Pengamatan Mariyono (2012) menemukan bahwa korupsi tidak saja terjadi pada negara-negara berpenghasilan rendah tetapi juga sangat mungkin terjadi pada negara-negara kaya yang berpenghasilan tinggi. Bahkan ditemukan pada negara-negara miskin potensi terjadinya korupsi sangat besar sehingga kemampuan atau daya rusak korupsi ini sangat dirasakan akibatnya oleh masyarakat, yaitu menurunnya perekonomian suatu bangsa. Penurunan ekonomi ini karena sejumlah dana yang harusnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai macam program pemerintah, diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan tertentu. Jelas ini merugikan masyarakat dan harus diberantas.

Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, Subagja (2013) mengemukakan bahwa membangun system politik yang demokratis dan memberantas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) menjadi *rallying call* untuk mempersatukan bangsa setelah dilanda krisis ekonomi. Meskipun amat menyulitkan bangsa, hikmah krisis keuangan Asia adalah ternyata system pemerintahan Orde Baru yang koruptif tidak dapat dipertahankan. Biaya korupsi tinggi, bukan saja biaya ekonominya yang mendistorsi, melainkan juga biaya social dan politiknya. Diperkirakan biaya korupsi pada tahun 1997/1998 sebesar 63% dari *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia, sementara ketidakadilan terus dirasakan dan demokratisasi tidak dapat digulirkan. Dari 52 negara yang dinilai oleh *Transparency International* pada waktu itu, Indonesia menempati urutan ke-46, hanya lebih baik daripada Meksiko, Pakistan, Rusia, Kolombia, Bolivia dan Nigeria. Perombakan sistem dan reformasi menjadi suatu keharusan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat empat faktor penyebab rendahnya kinerja dan kualitas birokrasi yaitu: faktor budaya, individu, organisasi dan manajemen, dan faktor politik. Perilaku koruptif sudah menjadi budaya dalam birokrasi, bahkan terlembaga. Pada tingkat individu, perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi secara egois, bukan kepentingan kelompok menjadi biasa, sedangkan individu yang mempunyai integritas cenderung untuk dikesampingkan. Dari aspek organisasi dan manajemen, dapat dijelaskan bahwa struktur birokrasi masih terlalu

sentralistis dan tidak terdesentralisasi. Proses pelayanan publik juga belum melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* seperti efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan, sehingga diperlukan pengukuran terhadap capaian kinerja pelaksanaan terhadap layanan publik.

Menurut Zakir (2013) pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh publik itu sendiri dapat diselenggarakan langsung oleh setiap institusi penyelenggara negara. Tidak hanya itu, bahwa pelayanan publik ini juga bisa diselenggarakan oleh korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan layanan publik.

Dengan demikian, pelayanan publik merupakan aspek penting dan perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, karena di lapangan masyarakat sering mengeluh dan merasakan tidak puas atas berbagai layanan yang diberikan oleh birokrasi. Mereka merasa tidak puas karena kinerja berbagai jenis dan bentuk pelayanan publik yang semakin buruk.



DAYA SAING BERBASIS SEKTORAL

Menurut Adawiyah et al., (2017) dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kontribusi pendidikan dalam meningkatkan daya saing bangsa. Perkembangan sektor pendidikan tidak terlepas dari unsur tenaga pendidik (guru dan dosen), yang sekaligus berkontribusi dalam menanamkan etika, budi pekerti luhur, kompetensi dan lain sebagainya. Dengan pendekatan kajian literatur diperoleh hasil bahwa guru yang memiliki kompetensi unggul akan dapat menciptakan iklim pendidikan yang berkualitas sehingga diperoleh hasil pendidikan yang unggul, yaitu dapat bersaing pada berbagai bidang pekerjaan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kajian literatur.

Studi Amirudin (2019) yang menguji pengaruh pendidikan dalam kaitannya dengan daya saing di tingkat nasional. Studi ini menggunakan pendekatan *library research*, yang bertujuan menjelaskan hubungan sektor pendidikan dengan daya saing nasional. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat berkontribusi pada pembangunan nasional diperlukan sistem pendidikan yang berkualitas pula. Jadi bangsa yang berdaya saing tinggi sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya karena sumber daya manusia ini menjadi operator pembangunan yang sekaligus penentu kebijakan-kebijakan strategis nasional. Studi terdahulu berbeda dengan penelitian ini jika ditinjau dari aspek pendekatan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan penelitian terdahulu menggunakan metode *library research*.

Menurut Setiono (2015), sebagai operator pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karenanya diperlukan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif terutama di pasar internasional.

Penelitian terdahulu di atas berbeda dengan penelitian yang akan dikerjakan khususnya terkait dengan pendekatan penelitian, bahwa penelitian terdahulu mengerjakan dengan pendekatan kualitatif dan penelitian yang akan dikerjakan menggunakan pendekatan kuantitatif regresi data panel. Disamping itu wilayah

penelitiannya juga berbeda, dimana penelitian terdahulu scope penelitiannya nasional sedangkan penelitian ini mengambil wilayah internasional yaitu pada negara-negara anggota OKI di ASIA terhadap variabel-variabel ekonomi indeks pendidikan dan indeks daya saing.

Lebih khusus Irawati & Subhan (2017) dalam studi kualitatifnya menemukan bahwa pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karenanya diperlukan insan pendidikan yang berkualitas yaitu guru, tenaga kependidikan dan siswa secara terintegrasi. Demikian halnya dengan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Wiyantiningsih (2017) dalam studi kualitatifnya menemukan bahwa kualitas pendidikan dapat mendorong meningkatnya daya saing sekolah dan bangsa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan terutama pada aspek pendekatan penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini pendekatan kuantitatif terutama dalam mendeskripsikan variabel penelitian. Demikian pula dengan lokus penelitian yang juga berbeda.

Untuk mengkaji implikasi aspek pendidikan terhadap daya saing, penelitian ini menggunakan angka indeks dalam memproxy variabel-variabel penelitian. Aspek pendidikan dinyatakan dalam bentuk indeks pendidikan dan daya saing diproxy oleh indeks daya saing. Latuconsina (2017) mengemukakan bahwa kesuksesan pembangunan dapat diukur oleh indeks pembangunan manusia

yang antara lain terkait dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Demikian juga studi Larso (2002) bahwa daya saing di Jawa Barat dapat meningkat ketika terdapat perbaikan dalam hal indeks pendidikan, indeks kesehatan dan infrastruktur.

Studi Mahendra et al. (2016) yang menguji tentang indeks pendidikan di Jawa Timur dan menjelaskan langkah-langkah untuk memperbaiki indeks pendidikan menemukan bahwa secara umum indeks daya saing suatu pemerintah daerah pada masa depan ditentukan oleh indeks pendidikan, oleh karenanya maka pendidikan ini termasuk dalam kategori investasi dalam jangka panjang. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada strategi analisis data, yaitu regresi berganda untuk penelitian terdahulu sedangkan penelitian ini menggunakan regresi data panel.

Berdasar penelitian terdahulu di atas jelas bahwa peningkatan indeks daya saing dapat terwujud ketika terdapat peningkatan dalam hal indeks pendidikan. Johnson (2015) mengemukakan bahwa setiap negara di dunia ini ingin mencapai keunggulan atau daya saing internasional. Oleh karenanya diperlukan reformasi pendidikan mengingat aspek pendidikan merupakan kunci dalam pembangunan dan secara empiris berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat internasional. Bahkan di Uni Eropa, terdapat korelasi yang kuat secara berkelanjutan antara pendidikan tinggi dengan daya saing ekonomi suatu negara (Krstić et al., 2020). Demikian juga di Asia Timur dan Asia Tenggara bahwa pendidikan

sangat penting dalam mewujudkan daya saing bangsa (Liu & Xu, 2017).

Mengingat indeks pendidikan merupakan aspek penting dalam indeks pembangunan manusia yang secara langsung berpengaruh terhadap daya saing global maka penelitian ini relevan dengan pengamatan Hamid (2019) yang menganalisis pengaruh faktor-faktor utama pembentuk Human Development Index (HDI) terhadap Global Competitiveness Index (GCI). Penelitian ini dilakukan untuk sepuluh negara di ASEAN. Metode analisis yang digunakan adalah panel kausalitas granger dan regresi data panel. Analisis panel non-hierarchical clustering juga digunakan untuk membagi negara menjadi dua cluster. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global Competitiveness Index (GCI). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Data diperoleh dari UNDP, UNESCO, dan Bank Dunia dari tahun 2010-2015. Penelitian ini menemukan bahwa IPM dan faktor pembentuknya mempengaruhi tingkat daya saing global. Analisis menyimpulkan bahwa: (1) Cluster Tinggi: Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand dan sisanya berada di Cluster menengah ke bawah dan (2) Semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial.

Sebelum membahas secara lebih khusus indeks kewirausahaan dalam kaitannya dengan indeks daya saing, berikut

ini dikemukakan mengenai implikasi kewirausahaan terhadap daya saing. Franco (2020) mengemukakan bahwa kewirausahaan dan inovasi merupakan bagian terpenting dari daya saing. Sementara itu (Szabo & Herman, 2012) mengemukakan bahwa inovasi merupakan kekuatan besar dari kegiatan ekonomi. Temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri kewirausahaan yaitu inovasi, dan inovasi dapat menggerakkan perekonomian serta peningkatan daya saing.

Hasil penelitian Ritonga & Yulhendri (2004) pada pengusaha mikro kecil makanan dan minuman di Padang mengungkapkan bahwa kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap daya saing. Demikian juga di Uni Eropa, menurut studi Herman (2018) bahwa kewirausahaan mempengaruhi tingkat daya saing pada negara-negara sebagai berikut: Denmark, Finlandia, Jerman, Belanda, Swedia, Inggris, Austria, Belgia, Perancis, Irlandia, Luksemburg, Slovenia, Republik Ceko, Estonia, Yunani, Hongaria, Italia, Polandia, Slovakia, Kroasia, Latvia, Lituania, Spanyol, Bulgaria dan Rumania.

Penelitian di Amerika Latin menyebutkan bahwa kewirausahaan mempengaruhi tingkat daya saing (Amorós & Cristi, 2008). Sedangkan di Inggris dalam kurun waktu tahun 1997-2010 menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing negara diperlukan pengembangan usaha dalam bentuk kewirausahaan (Huggins & Williams, 2011). Kedua penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan hasil penelitian meskipun lokus penelitian

(Amerika Latin dan Inggris) serta periode pengamatannya berbeda. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewirausahaan terkait dengan daya saing. Dengan kompetensi kewirausahaan niscaya dapat mendorong suatu negara menuju daya saing yang berkelanjutan.

Pawitan (2013) dalam penelitiannya yang menguji kontribusi semangat berwirausaha terhadap indeks daya saing di Indonesia menemukan bahwa peningkatan keinginan untuk berwirausaha secara signifikan mempengaruhi indeks daya saing. Tetapi ketika minat berwirausaha rendah dilain pihak jumlah penduduk Indonesia banyak maka rendahnya minat berwirausaha ini akan menjadi penyebab terhadap turunnya indeks daya saing Indonesia di tingkat global.

Inovasi merupakan lokomotif kewirausahaan, dan dengan kewirausahaan maka akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tingkat *Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN negara yang paling inovatif menurut Bloomberg 2016 dan *Global Innovation Index* 2015 yaitu Singapura. Artinya kewirausahaan di Singapura tumbuh subur dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, oleh karenanya tidak heran jika Singapura menjadi negara yang memiliki indeks daya saing tertinggi versi *Global Competitiveness Index* 2015-2016 (Parinduri, 2018). Xia et al. (2012) dalam studinya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan indeks daya saing.

Sedangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi pada saat indeks kewirausahaan juga mengalami peningkatan.

Studi yang menguji pengaruh korupsi, yang diukur dengan indeks persepsi korupsi terhadap indeks daya saing pada 108 negara di dunia menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan indeks korupsi terhadap indeks daya saing. Semakin bersih dari korupsi maka suatu negara semakin berdaya saing tinggi. Studi ini menggunakan data selama 2 tahun yaitu 2012 dan 2013 dengan analisis data menggunakan regresi sederhana (Ulman, 2013). Penelitian ini menggunakan data panel yang sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan, meskipun negara dan jumlahnya berbeda. Analisis datanya berbeda, dimana penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan regresi data panel. Dengan demikian terdapat perbedaan yang nyata antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

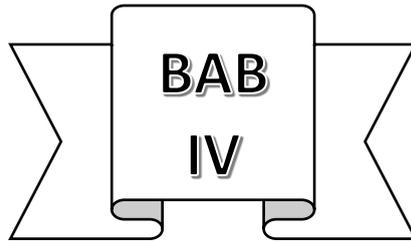
Penelitian tentang hubungan persepsi korupsi dengan persepsi daya saing pada 11 kota di Indonesia. Jenis data yang digunakan yaitu primer dengan jumlah responden sebanyak 1067 orang. Dengan uji Rank Spearman diperoleh hasil bahwa persepsi korupsi berhubungan positif dan kuat dengan daya saing (Kennedy, 2017). Hasil tersebut menjelaskan semakin bersih dari korupsi maka daya saing negara semakin tinggi. Penelitian ini berbeda dibanding penelitian yang akan dilaksanakan baik ditinjau dari aspek: periode pengamatan, jenis data (primer dan sekunder) dan alat analisis datanya.

Korupsi merupakan masalah setiap negara di dunia, dan tidak ada satupun negara yang bersih dari korupsi. Negara-negara yang dinilai memiliki tingkat daya saing nasional yang rendah dianggap lebih korup dibandingkan negara-negara yang lebih kompetitif. Kesimpulannya tingkat kesempatan kerja, standar hidup, produktivitas, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang merepresentasikan daya saing nasional merupakan penentu langsung dari persepsi korupsi (Ulman, 2014). Penelitian terdahulu berbeda jika dibandingkan penelitian yang akan dilaksanakan, terutama terkait dengan variabel penelitannya. Penelitian terdahulu menggunakan variabel persepsi korupsi dan daya saing, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan variabel indeks pendidikan, indeks kewirausahaan, indeks korupsi dan indeks daya saing.

Selaras dengan studi Kennedy (2017) dan Ulman (2013, 2014), Setyadharma (2007) dalam studinya pada enam negara di ASEAN yaitu: Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam menemukan bahwa terdapat trend yang searah korupsi dengan daya saing pada tahun 2006 hingga tahun 2006. Sehingga dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi persepsi korupsi maka suatu negara memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi menjadi fokus utama suatu negara khususnya di bidang ekonomi. Dengan demikian pemerintah selalu menekankan kepada penyelenggara negara untuk berhati-hati dengan korupsi bahkan menghindarinya.

Sedangkan untuk mengukur daya saing suatu negara menggunakan beberapa indikator yang lazim digunakan secara internasional misalnya pendapatan nasional (GDP), pendapatan per kapita dan total perdagangan yaitu ekspor. Sedangkan daya saing ditentukan oleh beberapa aspek antara lain indeks persepsi korupsi, dimana semakin tinggi indeks persepsi korupsi ini akan berdampak positif terhadap indeks daya saing dan akan membawa negara dalam kesuksesan pembangunan yang berkelanjutan (Setyadharna, 2007).

Pentingnya pengukuran terhadap daya saing dapat digunakan untuk membandingkan prestasi ekonomi suatu kota dan negara dibandingkan dengan kota dan negara lainnya di suatu kawasan bahkan dunia. Dengan demikian, daya saing ini tidak hanya untuk scope negara atau internasional, tetapi juga untuk scope kabupaten.kota dalam suatu Negara atau nasional. Jadi sudah selayaknya, Indonesia misalnya, menekan angka korupsi untuk memperbaiki posisi tawarnya di mata dunia internasional dalam bentuk peningkatan daya saing.



**BAB
IV**

STUDI KASUS PADA 14 NEGARA TERPILIH

Hasil penelitian yang pertama kali dikemukakan dalam penelitian ini terkait dengan statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian yaitu: indeks daya saing (Y), indeks pendidikan (X1), indeks kewirausahaan (X2) dan indeks korupsi (X3). Sedangkan item pengujian meliputi *mean*, *median*, *maximum*, *minimum*, *standard deviation*, *skewness*, *kurtosis*, *jarque-bera*, *probability jarque-bera*, *sum*, *sum sq. dev* dan *observations* sebagaimana pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	39.37386	67.30857	36.33600	42.50000
Median	53.69000	69.35000	36.77000	41.00000
Maximum	75.01000	83.00000	61.60000	71.00000
Minimum	3.410000	37.20000	11.77000	25.00000
Std. Dev.	29.27411	11.51661	13.39520	13.24983
Skewness	-0.295437	-0.009791	-0.049267	0.586290
Kurtosis	3.230899	3.529948	3.105385	3.434130
Jarque-Bera	10.14665	12.71538	2.362632	4.944191
Probability	0.062621	0.073301	0.306875	0.084408
Sum	2756.170	4711.600	2543.520	2975.000
Sum Sq. Dev.	59131.16	9151.635	12380.76	12113.50
Observations	70	70	70	70

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

Mean disebut juga dengan nilai rata-rata data yang dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data masing-masing variabel dan membaginya dengan cacah data. Nilai rata-rata untuk variable indeks daya saing (Y) sebesar 39.37386, indeks pendidikan (X1) sebesar 67.30857, indeks kewirausahaan (X2) sebesar 36.33600 dan indeks korupsi (X3) sebesar 42.50000.

Median merupakan nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap) ketika datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh *outlier* terutama bila dibandingkan dengan *mean*. Nilai *median* atau titik tengah untuk variabel indeks daya saing (Y) sebesar 53.69000, indeks pendidikan (X1) sebesar 69.35000, indeks kewirausahaan (X2) sebesar 36.77000 dan indeks korupsi (X3) sebesar 41.00000.

Maximum dan *minimum* merupakan nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data penelitian. Nilai *maximum* dan *minimum* untuk variabel indeks daya saing (Y) sebesar 75.01000 dan 3.410000, indeks pendidikan (X1) sebesar 83.00000 dan 37.20000, indeks kewirausahaan (X2) sebesar 61.60000 dan 11.77000 serta indeks korupsi (X3) sebesar 71.00000 dan 25.00000.

Standard deviation merupakan ukuran dispersi atau penyebaran data atau disebut juga dengan nilai simpangan baku. Semakin kecil nilai simpangan baku maka semakin homogen data yang ada. Dengan demikian data dengan dengan nilai simpangan baku semakin kecil maka semakin akurat dan menunjukkan distribusi data yang semakin mendekati normalitas. Nilai *standard deviation* untuk variabel indeks daya saing (Y) sebesar 29.27411, indeks pendidikan (X1) sebesar 11.51661, indeks kewirausahaan (X2) sebesar 13.39520 dan indeks korupsi (X3) sebesar 13.24983.

Skewness menunjukkan normalitas data dengan ketentuan data berdistribusi normal jika nilainya sebesar 0. Pada praktiknya

sulit mencari data dengan nilai skewness sebesar 0, oleh karena itu nilai hasil olahan data setidaknya-tidaknya mendekati 0. Nilai *skewness* untuk variabel indeks daya saing (Y) sebesar -0.295437, indeks pendidikan (X1) sebesar -0.009791, indeks kewirausahaan (X2) sebesar -0.049267 dan indeks korupsi (X3) sebesar 0.586290.

Kurtosis menunjukkan normalitas data dengan ketentuan data berdistribusi normal jika nilainya sebesar 3. Pada praktiknya sulit mencari data dengan nilai skewness sebesar 3, oleh karena itu nilai hasil olahan data setidaknya-tidaknya mendekati 3. Nilai *kurtosis* untuk variabel indeks daya saing (Y) sebesar 3.230899, indeks pendidikan (X1) sebesar 3.529948, indeks kewirausahaan (X2) sebesar 3.105385 dan indeks korupsi (X3) sebesar 3.434130.

Jarque-Bera digunakan untuk mengukur data yang berdistribusi normal. Demikian juga dengan *Probability Jarque-Bera* yang digunakan untuk mengukur normalitas data, yang digunakan dalam penelitian ini. Pada angka *Probability Jarque-Bera*, jika nilainya lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal. Nilai *Probability Jarque-Bera* untuk variabel indeks daya saing (Y) sebesar 0.062621, indeks pendidikan (X1) sebesar 0.073301, indeks kewirausahaan (X2) sebesar 0.306875 dan indeks korupsi (X3) sebesar 0.084408. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, pada jumlah data yang diobservasi yaitu sebanyak 70 data observasi pada masing-masing variabelnya.

Uji Model Common Effect (CEM) atau Panel Least Squares

Uji Model Common Effect merupakan salah satu uji regresi data panel yang sekaligus digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih model regresi terbaik. Uji ini wajib dilakukan yang kemudian dibandingkan dengan uji lainnya yaitu *fixed effect* dan *random effect* sehingga diperoleh persamaan regresi data panel yang bias dipertanggungjawabkan secara statistik.

Tabel 4.2. Uji Model Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.392615	22.39637	-0.330081	0.7424
X1	0.707742	0.367056	1.928161	0.0581
X2	-1.081461	0.488502	-2.213832	0.0303
X3	0.904125	0.437926	2.064560	0.0429
R-squared	0.094036	Mean dependent var	39.37386	
Adjusted R-squared	0.052856	S.D. dependent var	29.27411	
S.E. of regression	28.48996	Akaike info criterion	9.592425	
Sum squared resid	53570.72	Schwarz criterion	9.720911	
Log likelihood	-331.7349	Hannan-Quinn criter.	9.643461	
F-statistic	2.283517	Durbin-Watson stat	0.930095	
Prob(F-statistic)	0.087076			

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

Berdasar tabel 4.2 diperoleh hasil persamaan regresi sekaligus juga pola hubungan variabel independen (yaitu indeks

pendidikan, indeks kewirausahaan dan indeks korupsi) terhadap variabel dependen yaitu indeks daya saing.

$$Y = -7.392615 + 0,707742 X1 - 1.081461 X2 + 0.904125 X3$$

$$\text{Indeks daya saing} = -7.392615 + 0,707742 (\text{indeks pendidikan}) - 1.081461 (\text{indeks kewirausahaan}) + 0.904125 (\text{indeks korupsi})$$

Persamaan diatas dapat diterjemahkan bahwa indeks pendidikan berimplikasi positif terhadap indeks daya saing. Indeks kewirausahaan berimplikasi negatif terhadap indeks daya saing, dan indeks korupsi berimplikasi positif terhadap indeks daya saing.

Uji Model Fixed Effect (FEM)

Setelah dilakukan uji model *common effect*, pengujian berikutnya dari model regresi data panel yaitu *Uji Model Fixed Effect*. Hasil pengujian dengan model *fixed effect* dapat ditemukan pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Uji Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-498.9170	201.8673	-2.471509	0.0167
X1	10.37295	2.729002	3.801003	0.0004
X2	-4.145529	1.022824	-4.053023	0.0002
X3	-0.218012	1.083836	-0.201148	0.8414

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.490153	Mean dependent var	39.37386
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.336237	S.D. dependent var	29.27411
S.E. of regression	23.85011	Akaike info criterion	9.388965
Sum squared resid	30147.86	Schwarz criterion	9.935028
Log likelihood	-311.6138	Hannan-Quinn criter.	9.605868
F-statistic	3.184544	Durbin-Watson stat	1.431670
Prob(F-statistic)	0.000769		

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

Berdasar table 4.3 dapat dikemukakan terntang persamaan indeks daya saing pada empat belas negara OKI di ASIA yaitu:

$$Y = -498.9170 + 10.37295 X_1 - 4.145529 X_2 - 0.218012 X_3$$

Indeks daya saing = $-498.9170 + 10.37295$ (indeks pendidikan) – $4.145529 X_2$ (indeks kewirausahaan) – 0.218012 (indeks korupsi).

Setelah melakukan uji Model Common Effect dan uji Model *Common Effect* langkah berikutnya melakukan pemilihan model dengan melakukan uji Chow.

Uji Chow (Uji likelihood)

Sebagaimana telah di kemukakan bahwa Uji Chow ini dilakukan untuk memilih model terbaik, apakah *Model Common Effect* ataukah *Fixed Effect*. Table berikut merupakan hasil perhitungan secara statistik.

Tabel 4.4. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
--------------	-----------	------	-------

Cross-section F	3.167495	(13,53)	0.0015
Cross-section Chi-square	40.242213	13	0.0001

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

Berdasar tabel 4.4 dan jika dikaitkan dengan Bab III Metode Penelitian disebutkan bahwa, pengambilan keputusan dalam uji chow ini berangkat dari nilai probabilitas untuk *Cross-Section F*. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang dipilih yaitu *Common Effect Model*. Akan tetapi jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang dipilih yaitu *Fixed Effect Model*. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *Probability Cross-section F* = $0,0015 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 sehingga model *Fixed Effect* yang sesuai atau dipilih. Pengujian berikutnya yaitu melakukan uji *Model Random Effect* serta membandingkannya dengan uji *Hausman*.

Uji Model Random Effect (REM)

Tabel berikut ini merupakan hasil pengujian Model Random Effect.

Tabel 4.4. Uji Model Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.392615	18.74892	-0.394296	0.6946
X1	0.707742	0.307277	2.303269	0.0244
X2	-1.081461	0.408945	-2.644515	0.0102
X3	0.904125	0.366606	2.466204	0.0163

Effects Specification			
R-squared	0.094036	Mean dependent var	39.37386
Adjusted R-squared	0.052856	S.D. dependent var	29.27411
S.E. of regression	28.48996	Sum squared resid	53570.72
F-statistic	2.283517	Durbin-Watson stat	0.930095
Prob(F-statistic)	0.087076		

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

Uji Hausman

Sebagaimana dikemukakan pada Bab III Metode Penelitian bahwa untuk membuat keputusan tentang pemilihan model terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model digunakan uji *Hausman*. Hasil dari uji *Hausman* ini dapat digunakan untuk membuat estimasi terhadap data yang bersifat panel. Pengambilan keputusannya yaitu dengan melihat nilai probabilitas untuk *Cross-Section Random*. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang terpilih yaitu *Random Effect Model*. Tetapi jika probabilitas $< 0,05$ maka model yang dipilih yaitu *Fixed Effect Model*. Hasil uji Hausman sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	40.664234	3	0.0000

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

Berdasar tabel Hausman Test nilai Cross-section random = 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05 maka model yang dipilih yaitu *Fixed Effect Model*. Model final yang dipilih untuk kasus pada empat belas negara terkait indeks daya saing, indeks pendidikan, indeks kewirausahaan dan indeks korupsi disajikan dalam persamaan berikut ini.

$$Y = -498.9170 + 10.37295 X1 - 4.145529 X2 - 0.218012 X3$$

Indeks daya saing = $-498.9170 + 10.37295$ (indeks pendidikan) $- 4.145529 X2$ (indeks kewirausahaan) $- 0.218012$ (indeks korupsi).

Uji Normalitas

Tabel 4.6. Normality Test

	Y	X1	X2	X3
Jarque-Bera	10.14665	12.71538	2.362632	4.944191
Probability	0.062621	0.073301	0.306875	0.084408

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

Sebagaimana dijelaskan pada awal bab ini bahwa nilai *Probability Jarque-Bera* untuk variabel indeks daya saing (Y) sebesar 0.062621, indeks pendidikan (X1) sebesar 0.073301, indeks kewirausahaan (X2) sebesar 0.306875 dan indeks korupsi (X3) sebesar 0.084408. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik: Multikolinearitas

Tabel 4.7. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.568280	0.372744
X2	0.568280	1.000000	0.800406
X3	0.372744	0.800406	1.000000

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

Untuk mendeteksi multikolinieritas yaitu dengan membandingkan koefisien korelasi antarvariabel independen. Dimana jika nilai koefisien korelasi $< 0,8$ maka data tidak terjadi multikolinieritas. Berdasar tabel 4.7 dapat dikemukakan bahwa nilai korelasi antar variabel independen kurang dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolinieritas.

Uji Asumsi Klasik: Heteroskedastisitas

Tabel 4.8. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.37772	7.629646	2.408725	0.0188
X1	-0.036977	0.125043	-0.295714	0.7684
X2	0.257804	0.166415	1.549160	0.1261
X3	0.012639	0.149186	0.084719	0.9327
R-squared	0.111754	Mean dependent var		25.79356
Adjusted R-squared	0.071379	S.D. dependent var		10.07162

S.E. of regression	9.705512	Akaike info criterion	7.438710
Sum squared resid	6217.000	Schwarz criterion	7.567196
Log likelihood	-256.3549	Hannan-Quinn criter.	7.489746
F-statistic	2.767915	Durbin-Watson stat	1.081719
Prob(F-statistic)	0.048564		

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

Sebagaimana dikemukakan pada Bab III Metode Penelitian, bahwa ketentuan yang digunakan untuk memutuskan apakah data bersifat heteroskedastisitas atau tidak yaitu membandingkan nilai probabilitas masing-masing variabel independen dengan $\alpha = 5\%$. Ketentuan yang digunakan, jika nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ maka suatu data terbebas dari heteroskedastisitas.

Berdasar tabel 4.8 dapat dikemukakan bahwa nilai *Probability* seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,05 sehingga data terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Berdasar tabel 4.3 uji *Model Fixed Effect*, nilai Durbin-Watson statistic sebesar 1.431670. Nilai ini dalam interval 1 hingga 3, maka sesuai dengan pendapat Field (2009) dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi masalah autokorelasi.

Secara umum hasil studi ini menemukan bahwa indeks daya saing Negara-negara anggota OKI di ASIA mengalami penurunan pada saat indeks pendidikan meningkat, indeks kewirausahaan

turun dan indeks korupsi turun. Temuan tersebut dibuktikan oleh hasil uji yang signifikan, yaitu secara statistik ketiga indeks di atas berimplikasi terhadap indeks daya saing. Sedangkan secara khusus, berikut ini dikemukakan tentang implikasi masing-masing variabel bebas penelitian yaitu indeks pendidikan, indeks kewirausahaan dan indeks korupsi terhadap indeks daya saing.

A. Implikasi Indeks Pendidikan Terhadap Indeks Daya Saing

Pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu Negara karena peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai operator pembangunan dapat ditingkatkan ketika mereka mempunyai kompetensi. Kompetensi tidak hanya datang dari faktor talenta atau bakat, tetapi juga berangkat dari pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diterima oleh sumber daya manusia. Sedangkan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diberikan kepada sumber daya manusia ini bisa saja dilaksanakan di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan.

Pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ini sebagaimana dikemukakan oleh Wulandari et al., (2017) bahwa kompetensi individu tidak saja berdampak positif terhadap kinerja personal tetapi juga berimplikasi terhadap keunggulan bersaing perusahaan. Oleh karenanya perusahaan mengalokasikan dana yang besar untuk meningkatkan kompetensi karyawan melalui pendidikan sumber

daya manusia. Studi yang sama sebagaimana penelitian Hayati (2018) bahwa kompetensi dapat mempengaruhi efektivitas kerja, dan efektivitas kerja dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber dana perusahaan. Efektivitas kerja ini berasal dari pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu komponen untuk menghitung kesejahteraan masyarakat suatu Negara disamping kesehatan dan ekonomi. Pendidikan yang maju berarti dapat meningkatkan kompetensi sehingga Negara menjadi maju (Picatoste et al., 2020).

Penelitian ini juga relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Hartono (2011) bahwa untuk mewujudkan kewirausahaan yang kuat dan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu Negara maka diperlukan strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Bahkan dikemukakan bahwa kualitas wirausahawan dapat meningkat jika mereka ini memperoleh pengetahuan yang cukup melalui program pendidikan dan pelatihan untuk bersaing di era global.

Hasil studi ini relevan dengan temuan Adawiyah et al. (2017) yang menjelaskan tentang arti penting dan manfaat pendidikan untuk membangun ekonomi nasional. Patut diakui bahwa rendahnya daya saing Indonesia dibanding Negara-negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand salah satunya karena faktor pendidikan yang masih rendah. Sehingga direkomendasikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga

pendidikan baik di lembaga nonformal maupun formal untuk bersama-sama membangun kualitas pendidikan yang berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa dan Negara.

Penelitian yang mengkaji tentang pendidikan dan daya saing bangsa dilakukan oleh Amirudin (2019); Irawati & Subhan (2017), meskipun menggunakan lokus penelitian yang berbeda namun demikian hasil penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini, bahwa daya saing yang tinggi tidak bisa dilepaskan dari pendidikan yang bagus juga. Irawati & Subhan (2017) menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data diperoleh dari wawancara mendalam kepada kepala madrasah. Sedangkan Irawati & Subhan (2017), dengan *library research* diperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan yang digunakan. Karena dengan sistem pendidikan yang baik maka dapat meningkatkan daya saing suatu bangsa.

Sedangkan Johnson (2015) mengemukakan bahwa aspek penting yang menjadi kunci keberhasilan daya saing bangsa yaitu pendidikan, dan pendidikan dapat diwujudkan oleh peningkatan keterampilan peserta didiknya. Penelitian ini juga mendukung temuan Krstić et al. (2020) bahwa di Negara-negara anggota Uni Eropa pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari daya saing ekonomi suatu negara. Demikian juga dengan sektor pendidikan, dimana kemajuan pada pendidikan tinggi memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya saing Negara karena pembangunan sumber daya manusianya berhasil.

Pentingnya pembangunan pada sektor pendidikan yang dimaksud yaitu pendidikan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga aspek ini saling terintegrasi mengingat kognitif lebih dominan pada aspek penguasaan pengetahuan, afektif pada sikap dan aspek psikomotorik terkait dengan keterampilan (Hamid, 2019; Larso, 2002; Latuconsina, 2017; Liu & Xu, 2017; Mahendra et al., 2016; Setiono, 2015; Wiyantiningsih, 2017).

B. Implikasi Indeks Kewirausahaan Terhadap Indeks Daya Saing

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daya saing tidak bisa dilepaskan dari kewirausahaan. Namun demikian pengaruh kewirausahaan terhadap daya saing menunjukkan slope yang negatif. Artinya jika kewirausahaan meningkat maka daya saing mengalami penurunan. Hasil studi ini tidak relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Zimmerer et al. (2009), yang memandang kewirausahaan dalam konteks umum. Sedangkan penelitian ini mengkaji kewirausahaan dari dua sisi yaitu kewirausahaan pada aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Jika pengaruhnya negatif maka kewirausahaan ditinjau dari aspek kuantitas, dimana pembangunan kewirausahaan tidak cukup hanya dengan jumlah wirausahawan yang banyak.

Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah wirausahawan yang banyak pada situasi tertentu dapat

meningkatkan kesempatan kerja. Namun demikian jika lahirnya wirausahawan baru ini hanya dimotivasi oleh adanya bantuan dari pemerintah misalnya fasilitas kredit lunak atau disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka kewirausahaan belum bisa dikatakan berimplikasi positif terhadap daya saing bangsa. Penelitian terdahulu bahwa kualitas kewirausahaan berpengaruh positif terhadap daya saing bangsa sebagaimana dilakukan oleh Amorós & Cristi (2008) dan Franco (2020) bahwa perkembangan kewirausahaan di Negara-negara Amerika Latin sangat dinamis dan menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Demikian juga di Portugal bahwa kewirausahaan dengan ciri khusus inovatif dan kreatif dapat mendorong terwujudnya peningkatan daya saing Negara dibanding Negara lainnya.

Tidak saja di Amerika Latin dan Portugal bahwa kewirausahaan dapat meningkatkan daya saing sebagaimana penelitian Herman (2018), bahwa di Uni Eropa daya saing menjadi perhatian utama sekaligus menjadi tantangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk berkinerja tinggi dengan meningkatkan inovasi sehingga diperoleh UMKM yang berkinerja tinggi. Penelitian ini juga mendukung temuan Huggins & Williams (2011) bahwa kebijakan daerah yang pro kewirausahaan menjadi faktor penting meningkatnya kinerja UMKM yang pada tahapan berikutnya dapat mendorong peningkatan daya saing di Inggris.

Penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Parinduri (2018); Pawitan (2013);

Ritonga & Yulhendri (2004); Szabo & Herman (2012); Xia et al. (2012) yang secara umum menemukan bahwa kewirausahaan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing di Indonesia dan Uni Eropa, bahkan di China untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari aspek kewirausahaannya. Menurut Xia et al. (2012) kewirausahaan yang berkualitas yaitu wirausahawan yang mengelola usahanya secara professional sehingga dapat berperan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan daya saing China dalam bersaing dengan Negara-negara lainnya di dunia khususnya di bidang ekonomi.

C. Implikasi Indeks Korupsi Terhadap Indeks Daya Saing

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi berimplikasi negatif terhadap daya saing. Artinya korupsi yang meningkat di suatu Negara maka akan menurunkan daya saing bangsa dan sebaliknya, jika korupsi bisa diminimalisir maka daya saing mengalami peningkatan. Korupsi dapat terjadi dimana-mana, bisa di sektor pendidikan (Handayani, 2009) dan sektor swasta misalnya pada suatu korporasi (Hiariej, 2020). Korupsi dapat menjadi penghambat pembangunan (Effendi, 2019), karena korupsi mengambil uang rakyat yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi juga termasuk pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka korupsi harus dicegah, dihilangkan dan tidak boleh terjadi di Negara manapun.

Implikasi negatif korupsi terhadap daya saing ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Hawthorne (2015) bahwa korupsi menghambat pembangunan, dan pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Pembangunan dalam konteks ini yaitu pembangunan berkelanjutan sebagaimana penelitian Mukhtar (2012). Namun demikian pembangunan tidak cukup hanya focus pada pembangunan ekonomi, karena menurut Sudjana (2017) diperlukan pembangunan di bidang hukum karena investor membutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum ini tidak saja dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan klas mikro, kecil dan menengah juga membutuhkan kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dimaksud yaitu dalam bentuk keberpihakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan UMKM baik dari sisi keuangan misalnya bantuan kredit dalam bentuk KUR maupun non keuangan. Pada aspek non keuangan ini pemerintah dan swasta memiliki andil dalam memberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada UMKM. Undang-Undang Perseroan Terbatas (2007) memberikan penjelasan bahwa perusahaan wajib menyisihkan keuntungan perusahaannya untuk kepentingan sosial dan lingkungannya. Bahkan dijelaskan bahwa dana tanggung jawa sosial ini dialokasikan untuk membentuk kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan sehingga dapat terwujud yang namanya pembangunan dalam sektor ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan ini dalam rangka untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat yang mengedepankan kearifan lokal sebagaimana penelitian Purbantara et al. (2021) bahwa daya saing nasional tidak bisa dilepaskan dari daya saing daerah bahkan daerah tertinggal sekalipun. Produk yang menjadi unggulan desa dan unggulan daerah tertinggal bukan tidak mungkin go internasional ketika dikelola dengan baik menggunakan prinsip-prinsip manajerial yang benar. Produk-produk unggulan desa inilah yang harus digali, diproduksi dan dipromosikan ke luar yang melibatkan pemerintah dan pihak penuli lainnya.

Kembali ke persoalan implikasi korupsi terhadap daya saing, Rajagukguk (2016) menjelaskan bahwa daya saing merupakan fungsi dari korupsi. Penelitian ini juga mendukung temuan Setyadharma (2007) bahwa salah satu indikator peningkatan daya saing yaitu ketika penanaman modal asing meningkat. Peningkatan ini sekaligus merupakan kepercayaan investor asing kepada pemerintah Indonesia meskipun tingkat korupsi berada pada level korup.

Pada tahun 2021 nilai *Corruption Perceptions Index* atau indeks persepsi korupsi Negara-negara G20 sebanyak Sembilan belas negara termasuk Indonesia, menempatkan Indonesia pada peringkat ke 16 dengan nilai indeks sebesar 38 sama dengan nilai indeks Brazil dan Turki. Dengan demikian, berdasar tabel 2.4 Brazil, Indonesia dan Turki masuk pada level Negara yang korup.

Indeks pendidikan merupakan fungsi dari indeks daya saing, yang berarti bahwa pendidikan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing suatu Negara. Sebagai aktivitas yang secara sadar dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik dan pengembangan spiritual peserta didik, pendidikan baik informal, nonformal dan formal secara empiris mampu meningkatkan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia. Peningkatan kinerja sumber daya manusia ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan daya saing Negara secara signifikan di persaingan internasional.

Indeks kewirausahaan berimplikasi negatif signifikan terhadap indeks daya saing. Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan kewirausahaan tidak saja pada aspek kuantitas tetapi yang paling penting yaitu pembangunan secara kualitas. Secara kuantitas, misalnya dengan peningkatan jumlah wirausahawan. Memang penting dengan banyaknya jumlah wirausahawan, tetapi jika peningkatan jumlah ini hanya karena keinginan untuk memperoleh program pemerintah misalnya KUR dan ironisnya fasilitas ini hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya konsumtif pribadi maka peningkatan jumlah wirausahawan ini tidak banyak berimplikasi pada daya saing.

Pembangunan kewirausahaan yang bersifat kualitas inilah yang sangat penting. Karena penelitian ini membuktikan adanya implikasi yang berlawanan indeks kewirausahaan terhadap indeks daya saing. Lazimnya secara teoretis jika kewirausahaan meningkat

maka daya saing juga cenderung meningkat. Oleh karenanya diperlukan perubahan pembangunan kewirausahaan dari orientasi jumlah menjadi pembangunan kewirausahaan berorientasi kualitas. Niscaya jika pembangunan kualitas lebih diprioritaskan, maka pembangunan secara kuantitas akan mengikuti dengan sendiri.

Indeks korupsi berimplikasi negatif terhadap indeks daya saing. Meskipun hasilnya tidak signifikan, korupsi baik secara teoretis maupun empiris tetap saja mengganggu proses pembangunan baik di Indonesia maupun pada Negara-negara anggota OKI di ASIA. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika suatu Negara tingkat korupsinya rendah maka daya saing Negara tersebut tinggi. Sebagai contoh di Indonesia, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 indeks korupsi mengalami kenaikan yang berarti bagus dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi di tanah air. Sementara itu indeks daya saing juga meningkat, yang berarti juga bagus karena indeks daya saing semakin tinggi maka semakin bagus. Jadi strategi pemerintah untuk menurunkan tingkat korupsi atau meningkatkan nilai indeks korupsi berimplikasi pada peningkatan nilai indeks daya saing, yang bias saja berbeda jika diterapkan pada Negara selain Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Acs, Z. J., Szerb, L., Lafuente, E., & Markus, G. (2019). The Global Entrepreneurship Index 2019. In *Global Entrepreneurship Index*.
- Ács, Z., Szerb, L., & Lloyd, A. (2018). The Global Entrepreneurship Index 2018. In *The Global Entrepreneurship Index 2018*.
- Adawiyah, R., Wibowo, Y. S., & Kartika, Y. (2017). Pendidikan yang berdaya saing. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, 325–332.
- Ahmad. (2018). Pengukuran Education for All Development Index (EDI) Indonesia Tahun 2011-2015. *Seminar Nasional Dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*, 252–261.
- Al-Dulaimi, Z. Y. S. (2016). Education, Educational Services and their Quality. *Journal of Marketing Management*, 4, 2333–6099. <https://doi.org/10.15640/jmm.v4n1a6>
- Ali, A. J. (2011). Corruption and competitiveness. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 21(4), 2011–2014. <https://doi.org/10.1108/cr.2011.34721daa.001>
- Alsyafti, S. A. (2010). *Memulai Usaha Tanpa Uang (dalam Wirausaha Muda Mandiri: Kisah Inspiratif anak Muda Mengalahkan Rasa Takut dan Bersahabat dengan*

- Ketidakpastian, Menjadi Wirausaha Tangguh.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amdam, R. P. (1996). *Management, Education and Competitiveness.* London: Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203352564>
- Amirudin, M. F. (2019). Hubungan Pendidikan dan Daya Saing Bangsa. *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam.*
<https://doi.org/10.29240/belajea.v4i1.723>
- Amorós, J. E., & Cristi, O. (2008). Longitudinal analysis of entrepreneurship and competitiveness dynamics in Latin America. *International Entrepreneurship and Management Journal.* <https://doi.org/10.1007/s11365-008-0082-3>
- Antriyandarti, E. (2015). Competitiveness and Cost Efficiency of Rice Farming in Indonesia. *Journal of Rural Problems, 51*(2), 74–85. <https://doi.org/10.7310/arfe.51.74>
- Penyusunan Indeks Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender.* Jakarta: Badan Pusat Statistik, (2017) (testimony of BPS).
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=3489&th=2017>
- Chell, E. (2001). *Entrepreneurship: Globalization, Innovation and Development 1st Edition.* Cengage Learning EMEA.
- Costea, M., Hapenciuc, C.-V., & Bejinaru, R. (2016). Analysis of Global Competitiveness Pillars' Influence Upon the Romanian Tourism Industry. *Journal of Tourism - Studies and Research in Tourism, 22,* 64–75.

- Drucker, P. F. (2002). *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. New York: Harper & Row, Publishers, Inc.
- Dutta, I., & Mishra, A. (2005). *Inequality , Corruption , and Competition in the Presence of Market Imperfections*. UK: UNU-WIDER.
- Effendi, E. (2019). Relasi Tindak Pidana Korupsi dengan Negara Kesejahteraan. *Melayunesia Law*, 3(2), 166–180. <https://myl.ejournal.unri.ac.id/index.php/ML/article/view/6258/pdf>
- Eliezar, D. (2020). *Angka Indeks. Diklat Fungsional Statistisi Tk Ahli Angkatan 21 Tahun 2020*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS. <http://lusianaiskandar.blogspot.co.id/>
- Field, A. (2009). *DISCOVERING STATISTICS USING SPSS (and sex and drugs and rock 'n' roll)*. THIRD EDITION. SAGE Publications. ISBN 978-1-84787-906-6.
- Franco, M. (2020). Entrepreneurship, competitiveness and innovation. In *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su12166576>
- Hamid, E. S. (2019). Human Development Index and the Forming Factors: The Effect of Global Competitiveness Index in Ten ASEAN Countries. *JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS*. <https://doi.org/10.15640/jibe.v7n2a7>
- Handayani, T. (2009). Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, IV(2), 15–34.

<http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/183/215>

Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN ASIA PASIFIK. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*. <https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.32-44>

Hartono, W. (2011). *Pendidikan Entrepreneurship: Upaya Peningkatan Kemakmuran dan Daya Saing Bangsa di Era Globalisasi dalam Prosiding, Gelombang Baru Digitalpreneurship untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Bangsa*. Surabaya: Program studi MMT-ITS. ISBN: 978-602-97491-2-0.

Hawthorne, O. E. (2015). *Do International Corruption Metrics Matter?: The Impact of Transparency International's Corruption Perception*. Lexington Books. ISBN 978-1498508940.

Hayati, I. K. (2018). the Influence of Human Resource Competency on Employees Performance. *The Management Journal of Binaniaga*, 2(01), 21. <https://doi.org/10.33062/mjb.v2i01.50>

Herman, E. (2018). Innovation and entrepreneurship for competitiveness in the EU: an empirical analysis. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*. <https://doi.org/10.2478/picbe-2018-0038>

- Hiariej, E. O. S. (2020). Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 333–344. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>
- Hjertstrand, P., Swofford, J. L., & Whitney, G. A. (2021). Index numbers and revealed preference rankings. *Macroeconomic Dynamics*. <https://doi.org/10.1017/S1365100518000597>
- Huggins, R., & Williams, N. (2011). Entrepreneurship and regional competitiveness: The role and progression of policy. *Entrepreneurship and Regional Development*. <https://doi.org/10.1080/08985626.2011.577818>
- Ibrahim, M. D., Mamun, A. Al, Othman, N., Yusoff, M. N. H., Samy, N. K., Baba, S., Ismail, A. S. J., Mahmood, T. M. A. T., & Abdullah, N. N. H. N. (2019). The Development of an Entrepreneurship Index for Low-Income Households. *Business Perspectives and Research*. <https://doi.org/10.1177/2278533718800136>
- Irawati, & Subhan, M. (2017). Kepemimpinan Pendidikan Untuk Meningkatkan Daya Saing Di Madrasah Aliyah Kampar Timur. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 3(1), 1–16. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/dirasad/article/view/981/675>
- Istifadah, N. (2012). Meningkatkan keunggulan kompetitif nasional melalui pengembangan ekonomi kreatif menghadapi perekonomian global. *Conference: Seminar Nasional Kewirausahaan Dan Inovasi Bisnis*.

https://www.researchgate.net/publication/291126222_MENINGKATKAN_KEUNGGULAN_KOMPETITIF_NASIONAL_MELALUI_PENGEMBANGAN_EKONOMI_KREATIF_MENHADAPI_PEREKONOMIAN_GLOBAL

Johnson, S. (2015). Education and international competitiveness. *Journal of Initial Teacher Inquiry, Volume 1*.

Kamthe, M., & Verma, D. S. (2013). Product Life Cycle And Marketing Management Strategies. *International Journal of Engineering Research & Technology, 2(2)*, 1–8. <https://www.ijert.org/research/product-life-cycle-and-marketing-management-strategies-IJERTV2IS4914.pdf>

Kemendikbud RI. (2017). Metodologi dan Perhitungan dari Daya Saing Global Indeks 2017–2018. In *Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat*. <http://www.mercubuana.ac.id>

Kemenkeu. (2020). *Indeks Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur serta Pemanfaatannya dalam Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik 1*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Undang-Undang Perseroan Terbatas, (2007). <https://api.hukum.io/v2/regulations/download/eyJpdiI6IlwvMmx3ZzRzRVNmUHpqYWV2a1VTVE9BPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjFNMFwva0pOMk0lZWwhDaEE0RXFhOTNcL29IWGExO Tc0SUZzhV1wvVFNKQktOdmRTaURXb0I1aGhacmNOV0FYINTXC9MNVpONjFqZzhiOVgwZzkwaURxTW1kYzB0>

Q1JVVnlYTnVsZENzRWhLVzNGanJVQ2

Kemenristek-BRIN. (2020). *Panduan Indeks Daya Saing Daerah 2020*. Available at https://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id/upload/cms/panduan_1_1591346017.pdf.

Kennedy, P. S. J. (2017). Hubungan Persepsi Potensi Korupsi, Daya Saing Dan Kemudahan Berusaha Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Analisa Data Dari Survei Persepsi Korupsi). *Ikhraith-Humaniora*.

KPK. (2020). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik. In *Berita KPK*.

Krstić, M., Filipe, J. A., & Chavaglia, J. (2020). Higher education as a determinant of the competitiveness and sustainable development of an economy. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su12166607>

Kumar, R., & Chadee, D. (2002). International competitiveness of Asian firms: An analytical framework. *ERD Working Paper Series, 4*, 1–26.

Kuncoro, M. (2015a). *Mudah Memahami & Menganalisis INDIKATOR EKONOMI*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Kuncoro, M. (2015b). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. ISBN: 9789793532653.

- Lambsdorf, J. G. (2006). Causes and consequences of corruption: What do we know from a cross-section of countries? In S. Rose-Ackerman (Ed.), *International handbook on the economics of corruption* (pp. 1–51). Edward Elgar Publishing, Inc.
- Larso, D. (2002). PENGEMBANGAN PENGUKURAN DAYA SAING DENGAN METODOLOGI WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) UNTUK TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT: HASIL PENGUKURAN DAN IDENTIFIKASI FAKTOR KUNCI. *Journal of Technology Management*.
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.202-216>
- Liu, F., & Xu, H. (2017). Effects of educational efficiency on national competitiveness based on cross-national data. *Education Sciences*. <https://doi.org/10.3390/educsci7040081>
- Madung, O. G. (2016). Korupsi, Patronase dan Demokrasi. *JURNAL LEDALERO*, 15(1), 11–23. <http://ejurnal.stfklledalero.ac.id/index.php/JLe/article/download/26/109>
- Mahendra, R., Fariyanti, A., & Falatehan, A. F. (2016). STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PENDIDIKAN MELALUI ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH

BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TIMUR.

Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah.

https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24823

Mariyono, J. (2012). Corruption and Welfare: A Simple Econometric Across Countries Analysis. *Economic Journal of Emerging Markets*, 4(1), 63–75.

<https://doi.org/10.20885/ejem.v4i1.3176>

Méon, P., & Weill, L. (2008). Is corruption an efficient grease? In *Suomen Pankki*. Helsinki: Suomen Pankki.

<https://core.ac.uk/download/pdf/6659695.pdf>

Mostafa, G. M., & Bhuiyan, S. (2012). Overcoming Electoral Corruption: The Case of Bangladesh. In J. Mendilow (Ed.), *Money, Corruption, and Political Competition in Established and Emerging Democracies* (pp. 185-202).). Lexington Books.

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5224/1/UPS-QT03885.pdf>

Mukhtar, S. (2012). Menciptakan Keunggulan Daya Saing Wilayah Melalui Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 132–146.

<https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.615>

Nadya, Damia, & Riza. (2015). *Perkembangan Indeks Daya Saing Global: Indonesia. Referensi. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. No.02/ref.PKA/VI/2020.*

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-24.pdf>

Nadya, Damia, & Riza. (2020). *Perkembangan Indeks Daya Saing Global: Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-24.pdf>

O'Neill, R. (2015). Teaching Index Numbers to economists. In *Cogent Economics and Finance*. <https://doi.org/10.1080/23322039.2015.1115625>

Parinduri, L. (2018). Penilaian Daya Saing Inovasi. *Buletin Utama Teknik*, 13(2), 150–154.

Pawitan, G. (2013). EKSPLOKASI KETERKAITAN SEMANGAT ENTREPRENEURIAL DAN INDEKS DAYA SAING GLOBAL. *Jurnal Administrasi Bisnis*. <https://doi.org/10.26593/jab.v9i2.1211>.

Picatoste, X., Novo-Corti, I., & Tîrcă, D. M. (2020). *Human Development Index as an Indicator of Social Welfare*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69625-6_42-1

Prasetyo, P. S. (2013). *Membangun Komitmen dan Gerakan Semokrasi untuk Mencegah dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Indonesia.

Purbantara, A., Mujianto, & Rahmawati, E. (2021). PENGEMBANGAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL SERTA

TRANSMIGRASI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(3), 278–292.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35760/eb.2021.v26i3.3666>

Radovic-Markovic, M., & Tomaš, R. (2021). *Globalization and Entrepreneurship in Small Countries*. Routledge.

Rajagukguk, W. (2016). DAYA SAING (COMPETITIVENESS) MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI SEBUAH NEGARA: STUDI KASUS NEGARA BERKEMBANG. In: Proceeding Global Networking: Build Up Business Competitiveness. In *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha, Bandung. ISBN 978 979 19940 5 7. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Ratten, V., & Dana, L.-P. (2019). *Societal Entrepreneurship and Competitiveness*. UK: Emerald Publishing Limited. <https://books.emeraldinsight.com/resources/pdfs/chapters/9781838674724-TYPE23-NR2.pdf>

Ritonga, M., & Yulhendri. (2004). The Effect of Entrepreneurship Orientation and Competitive Advantage to Micro and Small Enterprises of Food and Beverage in Padang City. <https://doi.org/10.31227/Osf.Io/5xhb7>, July 2008, 2008.

- Rosyidi, S. (2020). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rugman, A. M., & Wright, R. W. (1999). *International Entrepreneurship: Globalization of Emerging Businesses (Research in Global Strategic Management) (Research in Global Strategic Management)*. Emerald Publishing Limited.
- Rusdiana. (2013). Kewirausahaan Teori dan Praktik. In *Bandung: Pustaka Setia*.
- Saputri, W. L., & Sirait, T. (2020). PENGHITUNGAN INDEKS KOMPOSIT DAYA SAING DESA/KELURAHAN MENGGUNAKAN CATPCA. *Seminar Nasional Official Statistics*. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.69>
- Schwab, K. (2019a). *The Global Competitiveness Report 2019*. Geneva: World Economic Forum. ISBN-13: 978-2-940631-02-5.
- Schwab, K. (2019b). The Global Competitiveness Report 2019. In *World Economic Forum*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
- Setiono, B. A. (2015). Strategi Peningkatan Daya Saing Melalui Pendidikan Entrepreneurship Dalam Rangka Menghadapi AEC. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 6(1), 63–69.
- Setiyono, B. (2018). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*.

Bandung: Nuansa Cendekia.

Setyadharma, A. (2007). Hubungan Antara Korupsi dengan Penanaman Modal Asing: Studi Kasus Enam Negara ASEAN: 1997-2005. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 22(3), 277–291.

<https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/6484/21432>

Subagja, N. (2013). Memberantas Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi dalam Korupsi dan Integritas dalam Rangka Perspektif. In *Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*.

Sudjana, U. (2017). Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 298–318.

<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a5>

Sukirno, S. (2014). Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. In *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*.

Suyatmiko, W., & Ratnaningtyas, S. (2017). *Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

Szabo, Z. K., & Herman, E. (2012). Innovative Entrepreneurship for Economic Development in EU. *Procedia Economics and Finance*. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00151-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00151-7)

The_Global_Competitiveness_Report. (2018). *Methodology and Computation of the Global Competitiveness Index 2017 – 2018*. [Www3.Weforum.Org](http://www3.weforum.org).

<https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/04Backmatter/TheGlobalCompetitivenessReport2017-2018AppendixA.pdf>

Tomáš, V. (2011). National Competitiveness and Expenditure on Education, Research and Development. *Journal of Competitiveness*, 2011(2), 3–10.

Transparency International. (2017). Transparency international - what is corruption? In *Transparency International*.

Triwiyanto, T. (2017). *Pengantar Pendidika*. Jakarta: Bumi Aksara.

Uddin, S. (2022). *Industri kreatif*. Researchgate.Net. https://www.researchgate.net/publication/358901068_INDUS TRI_KREATIF

Udokporo, C. (2021). *Understanding the Stages of the Product Life Cycle*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.99036>.

Ulfa, A. N. (2020). *Angka Indeks*. Spada.Uns.Ac.Id. [https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/237763/mod_resource/content/1/statistika pertemuan 4.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/237763/mod_resource/content/1/statistika%20pertemuan%204.pdf)

Ulman, S.-R. (2013). Corruption and National Competitiveness in Different Stages of Country Development. *Procedia Economics and Finance*. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00127-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00127-5)

Ulman, S.-R. (2014). The Impact of the National Competitiveness on the Perception of Corruption. *Procedia Economics and Finance*. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00660-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00660-1)

- Useche, A. J., & Reyes, G. E. (2020). Corruption, competitiveness and economic growth: Evidence from Latin American and Caribbean countries 2004-2017. *Journal Globalization, Competitiveness and Governability*, 14(1), 95–115. <https://doi.org/10.3232/GCG.2020.V14.N1.05>
- UU 31/1999. (1999). *Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 1–30.
- Wardhana, Y. (2007). *Manajemen Pendidikan Untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa*. Bandung: Pribumi Mekar.
- Wiyantiningsih, M. (2017). *Peningkatan Mutu Pendidikan untuk (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Sukolilo Jabung Kabupaten Malang)*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10021>
- Wulandari, J., Jaja Raharja, U., Nurasa, H., & Abdul Muhyi, H. (2017). Individual Competency Study in the Evolution of Human Resource Management Theory and Its Relation to Organizational Competency. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 5(03), 35–43. www.ijmas.org
- Xia, R., Liang, T., Zhang, Y., & Wu, S. (2012). Is global competitive index a good standard to measure economic growth? A suggestion for improvement. *International Journal of Services and Standards*. <https://doi.org/10.1504/IJSS.2012.048438>

Zakir, S. (2013). *My Name is Public Service: Kondisi Layanan Publik dan Integritas (dalam Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif)*. Jakarta: Pusat Studi Indonesia-Arab UIN Syarif Hidayatullah.

Zimmerer, T. W., Scarborough, N. M., & Wilson, D. (2009). *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*. Jakarta: Salemba Empat.

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM
2. NIP : 197108072005011003
3. Tempat, Tgl Lahir : Madiun, 7 Agustus 1971
4. NPWP : 496557174629000
5. Pekerjaan : PNS-Dosen Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung
6. Pangkat/Gol. : Pembina Tk I / IVc
7. Jabatan : Guru Besar
8. Tugas Tambahan : Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Syariah
9. Alamat Kantor : Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46
Tulungagung
10. Alamat Rumah : Jl. HOS Cokroaminoto, No. 59 A, Pare,
Kediri, Jawa Timur
11. Email : agusekosujianto@gmail.com
12. Hp : 085234635471
13. Scopus ID : 57195348648
14. Sinta ID : 6041141

B. Pendidikan

1. Doktor (Dr), Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 2006-2009 (Dibiayai oleh Beasiswa Program Pascasarjana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI);
2. Magister Manajemen (MM), Manajemen Keuangan, Universitas Gajayana Malang, 1997-1999 (Dibiayai oleh Beasiswa Program Pascasarjana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI);
3. Sarjana Ekonomi (SE), Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas GajayanaMalang, 1990-1994;
4. SMAN Nglames, Madiun, 1987-1990;
5. SMPN Nglames, Madiun, 1984-1987;
6. SDN Tanjungrejo, Nglames, Madiun, 1978-1984.

C. Pekerjaan

1. Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, mulai tahun 2005;
2. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang, 1994-2004;

D. Jenjang Jabatan Dosen dan TMT

1. Asisten Ahli, Nomor: Sti.32/KP.07.1/170/K/2007, TMT 1 April 2007;
2. Lektor, Nomor: Sti.28/Kp.07.1/328/K/2009, TMT 1 April 2009;
3. Lektor Kepala, Nomor: B.II/3/828, TMT 1 Mei 2011;
4. Guru Besar, NOMOR 71785/MPK.A/KP.05.01/2021, TMT 1 Oktober 2021.

E. Jenjang Pangkat / Golongan Ruang Dosen / TMT:

1. Penata Muda Tk. I / III/b,
Nomor : Sti.32/KP.07.1/170/K/2007, TMT 1 April 2009;2.
2. Penata / III/c,
Nomor : Sti.28/Kp.07.1/328/K/2009, TMT 1 April 2009;
3. Penata Tk. I / III/d,
Nomor : B.II/3/08447, TMT 1 Oktober 2011;
4. Pembina / IV/a,
Nomor : B.II/3/15949, TMT 1 Oktober 2013;
5. Pembina Tk. I / IV/b, Nomor : B.II/3/11006, TMT 1 Oktober 2015;
6. Pembina Utama Muda / IV/c,
Nomor : 00025/KEP/AA/15001/22.

F. Karya Ilmiah yang Dihasilkan (Jurnal)

1. 2021, Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Stimulus Ekonomi terhadap UMKM terdampak Pandemi Covid-19, JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi), 6(1), 85- 91. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14954>;
2. 2021, Service Quality and Consumer Satisfaction: An Empirical Study in Indonesia, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 971-977, doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0971;
3. 2021, Online-Based Collaborative Learning: Economics Teaching Innovation in Higher Education, Review of International Geographical Education Online, 11(2), 750-763.
4. 2021, Educational Services Marketing, EDUTECH: Journal of Education And Technology, 5(1), 36-45.
5. 2021, Implementation of Lecturer's Professional Competency in Assessing Financial Performance, EDUTECH: Journal of Education And Technology, 5(1), 89-103. <https://doi.org/10.29062/edu.v5i1.261>.
6. 2021, Implementation of Islamic Entrepreneurship Concept in Double Track SMA Program, Indonesian Economic Review, 1(2), 98-108. Retrieved from <https://iconev.org/index.php/ier/article/view/14>

7. 2021, Pelatihan Mendeley untuk Memperkuat Basis Referensi Karya Ilmiah Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, 5(2), 305-313.
<https://doi.org/10.29407/ja.v5i2.16356>
8. 2021, Financial Technology, Transaction Efficiency and Financial Satisfaction: The Mediating Role of Financial Achievement, Indonesian Economic Review, 1(1), 8-15.
Retrieved from
<https://www.iconev.org/index.php/ier/article/view/2>
9. 2020, Do Real Interest Rate, Gross Domestic Saving and Export Netto Matter in Economic Growth? Evidence From Indonesia, Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), Volume 7 Issue 11;
10. 2020, Factors Affecting Innovative Work Behavior: Mediating Role of Knowledge Sharing and Job Crafting, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(11), pp. 999–1007, DOI:10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.999
11. 2020, Macroeconomic Factors and Balance of Payment: Evidence from Indonesia, Industrial Engineering & Management Systems, Volume 19, Nomor 1;
12. 2020, Learning Management System Using Google Classroom for Economics Learning in Higher Education. International Journal of Advanced Science and Technology, Volume 29, No. 05, June;

13. 2020, Cooperative Entrepreneurial Decisions: Do Educational, Environment, and Family Aspects Matters? *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Volume 24, Issue 06;
14. 2020, Associative Study on Government Spending, Inflation, Trade Balance, and Gross Domestic Product, *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Volume 15, No 1;
15. 2020, Maintain Sustainable Development Environment: Exports of Crude Petroleum, Coal, Natural Gas and Gross Domestic Product in Indonesia, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Volume 469, Issue 1;
16. 2020, Determinants of Sharia Bank' Return on Asset in ASEAN, *Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 7(8), 244-248, DOI: 10.36347/sjebm.2020.v07i08.004;
17. 2020, The Indirect Impact of Profitability on Firm Value: Evidence Dividend Policy as Moderators and Capital Structure as Mediator. *Technium Social Sciences Journal*, 10(1), 299–311. <https://doi.org/10.47577/tssj.v10i1.1334>
18. 2020, The Determinants of Sovereign Sukuk Issuance from Organization of Islamic Cooperation Members. *Technium Social Sciences Journal*, 9(1), 318–325. <https://doi.org/10.47577/tssj.v9i1.1156>;

19. 2020, The Leadership of Female Madrasah Head in Developing Entrepreneurship, International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 9(3) Ser.II, 59-63, [https://www.ijhssi.org/papers/vol9\(3\)/Series-2/J0903025963.pdf](https://www.ijhssi.org/papers/vol9(3)/Series-2/J0903025963.pdf);
20. 2020, Implementation of Marketing Strategy of Islamic Education in Enhancing Customer Loyalty in Disruption Era, International Journal of Recent Scientific Research (IJRSR), 11(02), 37585-37588, DOI: <http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2020.1102.5139>;
21. 2019. PKM Keripik Pare dan STIK Lidah Buaya di Desa Wisata Kampung Lawas Maspati Kota Surabaya, J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), 7(1), 34–40,
22. 2019. Pembinaan Manajemen Ekonomi Syariah Anggota Koperasi Wanita Syariah As Salam Bulusari Tulungagung. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 305-312. DOI: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.3479>
23. 2019, Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung, E- DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 10(1), 116-125, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas/article/view/3559/2374>

24. 2019, Pelatihan Generasi Millennials Melalui Transformasi Daun Alpukat Menjadi Minuman Menyehatkan dan Menyegarkan, Jurnal Abdi Masyarakat, 2(2), 76-90, Doi: <http://dx.doi.org/10.30737/jaim.v2i2.368>
25. 2019, Causal Relationships GDP per Capita, Human Development Index and Corruption Perceptions Index in Indonesia, International Conference on Science, Technology, and Environment 2019, Jogjakarta 29-30 August, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3495034
26. 2019, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyediaan Mesin Pakan Ikan Lele Di Desa Nogosari Kabupaten Pacitan, ADIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(2), 23-30, <http://dx.doi.org/10.24269/adi.v3i2.1630>
27. 2018, Jakarta Composite Index, Sharia Stock Index and Rupiah Exchange Rate before and after the Indonesian Presidential Election 2014, American Journal of Economics, 8(6): 254-262, doi: 10.5923/j.economics.20180806.04
28. 2018, Income Differences, Trade and Institutions: Empirical Evidence Form Low and Middle- Income Countries, Business and Economic Horizons, 14(2), 217-228, DOI: 10.15208/beh.2018.17

29. 2018, Pendidikan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Produksi Tahu Dan Kerupuk Okara Bagi Ibu Rumah Tangga Desa Bendiljati Kulon Kabupaten Tulungagung, J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), 6(1), 27–34, DOI: <https://doi.org/10.29100/j-adimas.v6i1.680>
30. 2018, Remittance, Economic Growth and Household Consumption in Indonesia, in International Conference on Economics, Business and Economic Education 2018, KnE Social Sciences, pages 422–436. DOI 10.18502/kss.v3i10.3145
31. 2017, Evaluasi Nilai Ekspor dan Impor Regional Association of Southeast Asian Nations Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi Tahun 1998, INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 11(2), 329-350, DOI: 10.18326/infsl3.v11i2.329-350
32. 2016, The Contribution of the Performance Efficiency of Islamic Commercial Banks to Economic Growth: Evidence from Indonesia, International Journal of Economic Perspectives, 10(4), 442- 453, https://www.researchgate.net/publication/319304492_The_contribution_of_the_performance_efficiency_of_islamic_commercial_banks_to_economic_growth_Evidence_from_Indonesia
33. 2016, Model Pendidikan Wirausaha di Pesantren, Proceedings of the International Conference on University-Community Engagement Surabaya – Indonesia, 2 - 5 August, pp. 525–546.

34. 2013, Budaya Corporate dan Rentabilitas Bank Umum Swasta Syari'ah Indonesia. Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, 20(2), 1-18.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.28>.
35. 2012. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Pondok Pesantren, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 6(2), 325-348, DOI: <https://doi.org/10.18326/infsl3.v6i2.325-348>

G. Karya Ilmiah yang Dihasilkan (Buku)

1. 2020, Manajemen Budidaya Ikan dan Sayuran Sistem “Minasa” Menuju KEMANDIRIAN Berkelanjutan Kelompok EKONOMI Produktif Desa Kedungcangkring di Tulungagung, Buku Referensi, Tulungagung: Akademia Pustaka, ISBN 978-623-7706-48-9.
2. 2018, Hubungan Kausalitas Toda-Yamamoto Anggaran Pendidikan, Kesehatan dan Gross Domestic Product di Indonesia, Tulungagung: Cahaya Abadi, ISBN 978-602-8569-59-0.
3. 2017, Mengubah Kotoran Menjadi Emas. In: Perjuangan Memberdayakan Masyarakat: Catatan Dosen IAIN Tulungagung. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, pp 7-10, ISBN 978-602- 61824-2-5.

4. 2017, Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Produksi, Konsumsi dan Distribusi Tahu di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung, Tulungagung: Cahaya Abadi, ISBN 978-602-8569- 47-7.
5. 2016, Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Tulungagung: Cahaya Abadi, ISBN 978-602-8569-54-5
6. 2014, Membangun Loyalitas Nasabah, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, ISBN 978-602- 1090-08-4
7. 2013, Pembelajaran Menilai Struktur Keuangan Perusahaan, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, ISBN 978-602-7824-17-1
8. 2012, Pendapatan Nasional, Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor Bersih: Studi Empiris pada Negara-Negara di ASEAN Terpilih, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, ISBN 978-602-8615-82-2

H. Mitra Bebestari Jurnal (Reviewer) dan Pengelola Jurnal

1. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, SCOPUS Q4 SJR 0.16, CZECH REPUBLIC;
2. JESP: Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Terakreditasi Nasional (Sinta 2), INDONESIA;

3. Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, FE Universitas Muhamadiyah Ponorogo, Terakreditasi Nasional (Sinta 2), INDONESIA;
4. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Kudus, Terakreditasi Nasional (Sinta 2), INDONESIA;
5. Jurnal Transformatif (Islamic Studies), Pascasarjana IAIN Palangka Raya (Sinta 4), INDONESIA;
6. MEC-J (Management and Economics Journal) (Sinta 4), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, INDONESIA;
7. Balance: Jurnal Ekonomi (Sinta 4), published by the Development Economics Study Program of the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, INDONESIA;
8. JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi) (Sinta5), Universitas Nusantara PGRI Kediri, INDONESIA;
9. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMK) (Sinta 5), Universitas Islam Kadiri – Kediri, INDONESIA;
10. Amnesty: Jurnal Ilmu Perpajakan (Sinta 5), the Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. INDONESIA;
11. JIKB (Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis), STMIK Dharmapala Riau, Terakreditasi Nasional (Sinta 6), INDONESIA;

12. Quantitative Economics Research, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Jurnal Nasional (DOAJ), INDONESIA;
13. Invoice: Journal of Accounting Science, published by the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, INDONESIA;
14. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, published by the Islamic Economics Study Program of the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, INDONESIA;
15. Profitability Management Science Journal, published by the Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, INDONESIA;
16. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Jurnal Nasional (Google Scholar);
17. J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), STKIP PGRI Tulungagung;
18. EDITOR IN CHIEF An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SATU Tulungagung (DOAJ, MORAREF, COPERNICUS, Sinta 3).

I. PENGHARGAAN

NAMA	ORGANISASI	TAHUN
Best Paper 3 Seminar Nasional Manajemen & Call for Papers 2022	Universitas Negeri Surabaya	2022
Dosen Terbaik 2 Kategori Jumlah Artikel Terbanyak	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	2021
Dosen Terbaik 3 Kategori Skor SINTA Terbanyak	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	2021
Juara Harapan II LKT Koperasi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2012
Juara II LKT Koperasi	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	2011
Penulis Terbaik Kategori Pendidikan	Majalah Media Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	2010
Juara III LKT	Pemerintah Kabupaten	2010

Perkoperasian	Tulungagung	
Penulis Terbaik kategori artikel pendidikan	Majalah Media Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	2009
Peneliti Terbaik Kedua Tingkat Nasional	Departemen Agama Republik Indonesia	2006



Agus Eko Sujianto

MEMBANGUN DAYA SAING BANGSA BERBASIS SEKTORAL TANPA KORUPSI

**Agus Eko Sujianto
Mashudi**



Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM, Lahir di Madiun, 7 Agustus 1971. Menyelesaikan pendidikan Doktor S3 Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang, 2006-2009 (Dibiayai oleh Beasiswa Program Pascasarjana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI). Menyelesaikan Magister Manajemen (MM), Manajemen Keuangan, Universitas Gajayana Malang, 1997-1999 (Dibiayai oleh Beasiswa Program Pascasarjana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI). Menyelesaikan Sarjana Ekonomi (SE), Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Gajayana Malang, 1990-1994. Sekarang masih aktif mengajar di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung dan mendapat tugas sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.



Dr. MASHUDI, Lahir di Nganjuk 31 januari 1969. Menyelesaikan Pendidikan Doktor S3 Ilmu Ekonomi. Beralamat di jalan bok brobos no.16 Ngadiluwih Kediri.



ISBN 978-623-88483-5-5 (PDF)

